

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

PROVINSI
Sulawesi Selatan

2022



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

PROVINSI
Sulawesi Selatan

2022



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN 2022

Katalog BPS : 4102002.73
Nomor Publikasi : 73000.2301
Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman : x + 53 halaman

Naskah :
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Penyunting :
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Desain Sampul :
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Diterbitkan dan Dicitak Oleh :
©Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan

Sumber Ilustrasi :
freepik.com, unsplash.com

Dilarang Mengumumkan, Mendistribusikan, Mengomunikasikan, dan/atau Menggandakan Sebagian atau Seluruh isi Buku ini Untuk Tujuan Komersial Tanpa Izin Tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

**INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
2022**

Pengarah

Sunto

Penanggungjawab

Wuri Wahyuni

Editor

Wuri Wahyuni

Penulis

Rosyita Darojati A'laa

Desain Sampul dan Tata Letak

Muhammad Ilham Mubarak

Kata Pengantar

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan Tahun 2022 ini memberikan gambaran umum, metodologi, perkembangan IPM di Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota, disparitas pembangunan dari berbagai aspek dan isu terkait daya beli masyarakat.

Ada tiga pilihan paling mendasar pada pembangunan manusia yaitu untuk berumur panjang dan hidup sehat, untuk memperoleh pendidikan dan untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber kebutuhan agar hidup secara layak.

Semoga apa yang disampaikan pada publikasi ini dapat memberi nilai positif bagi setiap pengguna data dan mampu memperkaya khazanah pustaka BPS. Berbagai saran dan masukan sangat diharapkan demi edisi yang lebih baik di masa mendatang. Dan kepada semua pihak yang telah berkontribusi pada penyusunan publikasi ini kami ucapkan terimakasih.

Makassar, Januari 2023



Suntono

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Selatan

Daftar Isi

v	· KATA PENGANTAR
vi	· DAFTAR ISI
vii	· DAFTAR TABEL
viii	· DAFTAR GAMBAR
x	· DAFTAR LAMPIRAN
1	· BAB I
	· PENDAHULUAN
3	· 1.1. Pengukuran Pembangunan Manusia
6	· 1.2. Indikator IPM Metode Baru
9	· 1.3. Penghitungan IPM Metode Baru
9	· 1.4. Klasifikasi Pembangunan Manusia
10	· 1.5. Mengukur Kecepatan Pembangunan Manusia
11	· BAB II
	· PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN MANUSIA SULAWESI SELATAN
13	· 2.1. Posisi Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan
16	· 2.2. Status IPM Sulawesi Selatan
19	· 2.3. Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota
25	· BAB III
	· KEMAJUAN PEMBANGUNAN MANUSIA SULAWESI SELATAN
	· CAPAIAN DAN TANTANGAN
27	· 3.1. Capaian dan Tantangan Bidang Pendidikan
29	· 3.2. Capaian dan Tantangan Bidang Kesehatan
29	· 3.3. Capaian dan Tantangan Bidang Ekonomi
31	· BAB IV
	· DISPARITAS PEMBANGUNAN MANUSIA SULAWESI SELATAN
33	· 4.1. Disparitas Antarindividu
33	· 4.2. Disparitas Antargender
35	· 4.3. Disparitas Antarwilayah
39	· BAB V
	· DAYA BELI MASYARAKAT
41	· 5.1. Isu Pelemahan Daya Beli
42	· 5.2. Faktor yang diduga mempengaruhi Daya Beli
45	· LAMPIRAN

Daftar Tabel

- 8 : Tabel 1.1 Nilai Minimum dan Maximum IPM Metode Baru
- 13 : Tabel 2.1 IPM Sulawesi Selatan dan Komponen, 2021-2022
- 18 : Tabel 2.2 IPM dan Komponen Pembentuk IPM Provinsi di Pulau Sulawesi, 2022
- 41 : Tabel 5.1 Distribusi persentase PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Pengeluaran 2019-Q3 2022 (persen)

<https://sulsel.bps.go.id>

Daftar Gambar

- 4 : Gambar 1.1 Sejarah Pengukuran IPM
- 5 : Gambar 1.2 Perubahan Pengukuran IPM
- 5 : Gambar 1.3 Pengukuran IPM Metode Lama dan Metode Baru
- 8 : Gambar 1.4 Komoditas Perhitungan Paritas Daya Beli pada IPM
- 9 : Gambar 1.5 Rumus Perhitungan IPM Metode Baru
- 9 : Gambar 1.6 Klasifikasi Capaian IPM
- 14 : Gambar 2.1 Tren dan Pertumbuhan IPM Sulawesi Selatan, 2018-2022
- 14 : Gambar 2.2 Tren Umur Harapan Hidup (UHH) dan Pertumbuhannya di Sulawesi Selatan, 2018-2022
- 15 : Gambar 2.3 Tren Harapan Lama Sekolah Sulawesi Selatan, 2018-2022
- 16 : Gambar 2.4 Tren Rata-rata Lama Sekolah Sulawesi Selatan, 2018-2022
- 16 : Gambar 2.5 Tren Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribuan Rupiah) dan Pertumbuhannya di Sulawesi Selatan, 2018-2022
- 17 : Gambar 2.6 Perbandingan IPM Sulawesi Selatan dengan Nasional, 2018-2022
- 17 : Gambar 2.7 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Pulau Sulawesi, 2022
- 19 : Gambar 2.8 Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota terhadap IPM Sulawesi Selatan, 2022 (persen)
- 20 : Gambar 2.9 Peta Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2022
- 21 : Gambar 2.10 Pertumbuhan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2022
- 22 : Gambar 2.11 Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2022
- 22 : Gambar 2.12 Pertumbuhan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan tahun 2022
- 23 : Gambar 2.13 Pertumbuhan Pengeluaran perkapita yang disesuaikan Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan, periode 2022 (Ribuan Rupiah)
- 27 : Gambar 3.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Sulawesi Selatan, 2017-2022 (persen)
- 28 : Gambar 3.2 Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Sulawesi Selatan, 2017-2022 (persen)
- 30 : Gambar 3.3 Jumlah dan Persentase penduduk Miskin Sulawesi Selatan 2017-2022
- 30 : Gambar 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Selatan Periode Agustus Tahun 2018-2022 (persen)

Daftar Gambar

- 33 : Gambar 4.1 Tingkat Ketimpangan (Gini Rasio) di Sulawesi Selatan Maret 2017 - September 2022
- 34 : Gambar 4.2 Angka Partipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Selatan, 2022 (Persen)
- 34 : Gambar 4.3 Angka Partipasi Murni (APM) Menurut Jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Selatan, 2022 (Persen)
- 35 : Gambar 4.4 Selisih IPM Kota Makassar dan Kabupaten Jeneponto, 2018-2022
- 36 : Gambar 4.5 Selisih Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Jeneponto, 2018-2022 (Tahun)
- 36 : Gambar 4.6 Selisih Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Makassar dan Kabupaten Jeneponto, 2018-2022 (Tahun)
- 37 : Gambar 4.7 Selisih Pendapatan Pengeluaran per Kapita (PPP) Kota Makassar dan Kabupaten Tana Toraja, 2018-2022 (Ribu Rupiah)
- 42 : Gambar 5.1 Laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Sulawesi Selatan (*y-on-y*), 2020-2022
- 42 : Gambar 5.2 Laju Inflasi Gabungan 5 Kota di Sulawesi Selatan, 2016-2022
- 43 : Gambar 5.3 Laju Inflasi Bulanan Gabungan 5 Kota di Sulawesi Selatan, 2021-2022

Daftar Lampiran

- 47 : Lampiran 1 Tren Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2015-2022 (Tahun)
- 48 : Lampiran 2 Tren Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2015-2022 (Tahun)
- 49 : Lampiran 3 Tren Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2015-2022 (Tahun)
- 50 : Lampiran 4 Tren Paritas Daya beli (PPP) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2015-2022 (Ribuan Rupiah)
- 51 : Lampiran 5 Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2015-2022
- 52 : Lampiran 6 Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi di Indonesia, 2015-2022
- 53 : Lampiran 7 Tren Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Paritas Daya Beli (PPP) Menurut Provinsi, 2021-2022

BAB I

Pendahuluan

<https://sulsel.bps.go.id>

BAB I

Pendahuluan

Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Keberadaan manusia sebagai pelaku pembangunan tidak dapat dikesampingkan sebagai faktor utama, sehingga dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya.

Pembangunan manusia merupakan model pembangunan yang menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) ditujukan untuk memperluas pilihan-pilihan yang dapat ditumbuhkan melalui upaya pemberdayaan penduduk. Walaupun pada dasarnya, pilihan tersebut tidak terbatas dan terus berubah, tetapi dalam konteks pembangunan, pemberdayaan penduduk ini dicapai melalui upaya yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan dasar manusia yaitu meningkatnya derajat kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan agar dapat digunakan untuk mempertinggi partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif, sosial budaya, dan politik.

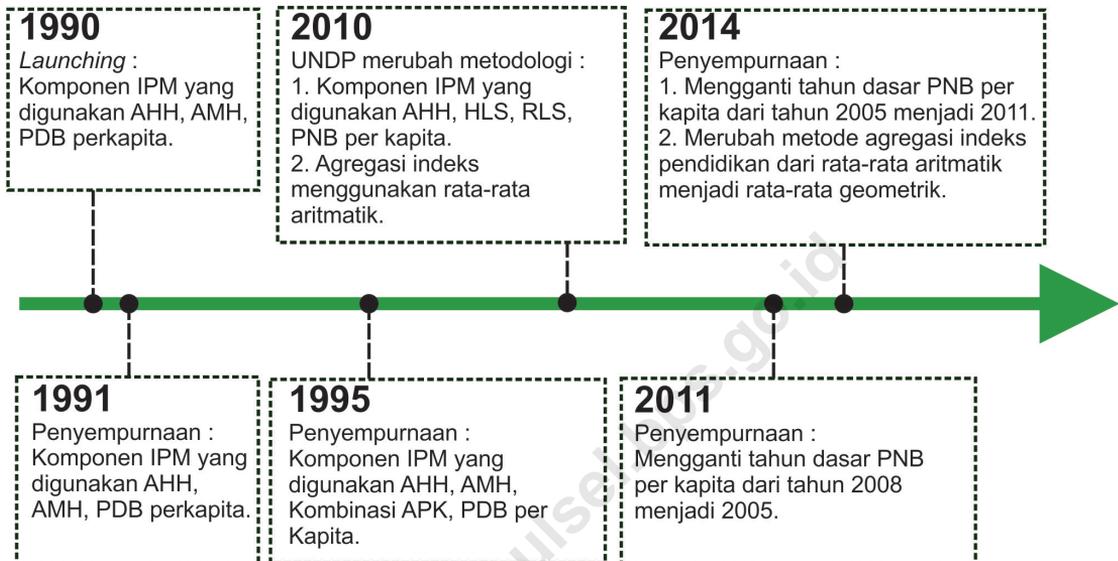
Sebelum tahun 1970-an, pembangunan semata-mata dipandang hanya sebagai fenomena ekonomi saja. Pengalaman pada dekade tersebut menunjukkan bahwa adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi gagal dalam memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya. Oleh karena itulah konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki konsep pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat meliputi: pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural, dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua aspek kehidupan manusia (BPS, 2017).

1.1. Pengukuran Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia menggunakan pengukuran yang sudah dikenalkan oleh UNDP pada tahun 1990, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada *Human Development Report* 1990 diperkenalkan tiga indikator

pembentuk indeks pembangunan manusia yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dari ketiga dimensi tersebut, diturunkan empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM, yaitu Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Angka Melek Huruf (AMH), gabungan Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.



Gambar 1.1 Sejarah Pengukuran IPM

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru, 2016

Sejak diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990, laporan pembangunan manusia telah dikembangkan, dan yang terakhir penyempurnaan penyusunan IPM menggunakan metode baru pada tahun 2014. Secara berkala UNDP melakukan penyempurnaan dalam penghitungan IPM. Tahun 2010, UNDP melakukan penyempurnaan kembali dengan tetap menggunakan tiga dimensi yang sama yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak namun menggunakan indikator yang berbeda yaitu umur harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

Metode agregasi IPM pun mengalami penyempurnaan, dari rata-rata aritmatik diubah menjadi rata-rata geometrik. Adapun metode agregasi untuk indeks pendidikan berubah dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik. Penyempurnaan metodologi IPM pada tahun 2014 meliputi :

1. Mengganti tahun dasar PNB per kapita dari 2005 menjadi 2011,
2. Mengubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik

1990	2010
DIMENSI/INDIKATOR	DIMENSI/INDIKATOR
A. Kesehatan : Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	A. Kesehatan : Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
B. Pendidikan	B. Pendidikan
C. Angka Melek Huruf (AMH)	C. Harapan Lama Sekolah (HLS)
D. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	D. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
E. Standar Hidup: PDB perkapita	E. Standar Hidup: PNB perkapita
AGREGASI INDEKS	AGREGASI INDEKS
Rata-rata Hitung	Rata-rata ukur/Geometrik

Gambar 1.2 Perubahan Pengukuran IPM

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru, 2016

Adapun indikator yang berubah, yaitu :

1. Angka Melek Huruf (AMH) pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)
2. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita

Perubahan metode penghitungan IPM menghasilkan nilai IPM yang lebih sempurna dibanding IPM metode sebelumnya. Keunggulan IPM metode baru adalah karena menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Dengan memasukkan memasukkan Rata-rata Lama Sekolah dan angka Harapan Lama Sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih

Metode Lama	Metode Baru
Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
Angka Melek Huruf (AMH) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 15 th +	Harapan Lama Sekolah (HLS) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 25 th +
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan: 27 Komoditas PPP	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan: 96 Komoditas PPP
Rata-rata Hitung	Rata-rata Geometrik
Reduksi Shortfall (RSF)	Pertumbuhan Aritmatik

Gambar 1.3 Pengukuran IPM Metode Lama dan Metode Baru

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru, 2016

relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. Selain itu, PNB yang menggantikan PDB lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Sedangkan untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan. Penambahan komoditas yang digunakan untuk menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan menghasilkan nilai yang lebih baik.

Keuntungan lainnya adalah dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

1.2. Indikator IPM Metode Baru

a. Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) atau *Life Expectancy* (e_0) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. UHH dihitung dari hasil Proyeksi SP2010. Dasar penghitungan UHH adalah menggunakan Angka Kematian Bayi atau *Infant Mortality Rate* (IMR) dengan pola model *West Coale-demeny Trussell equations* dan proyeksi IMR.

b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) atau *Mean Years of Schooling* (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Untuk nilai RLS, diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun.

RLS digunakan pada IPM metode lama dan metode baru untuk mengukur dimensi pendidikan. Tetapi terdapat perbedaan mendasar dalam definisi RLS ini. Dimana pada IPM metode lama, RLS dihitung untuk penduduk usia 15 tahun ke atas. Sedangkan pada IPM metode baru, cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Selain itu, penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

c. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) atau *Expected Years of Schooling* (EYS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Secara matematis, pada dasarnya HLS merupakan ekspektasi yang artinya menjumlahkan seluruh peluang yang mungkin untuk semua nilai variabel. Jadi misalnya masih ada penduduk usia 60 tahun yang sekolah, akan berpengaruh pada HLS walaupun besarnya tidak signifikan.

Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren. Data siswa yang bersekolah di pesantren diperoleh dari Direktorat Pendidikan Islam. Faktor koreksi untuk siswa yang sekolah di pesantren dirumuskan sebagai:

$$\text{Rasio Santri Mukim} = \frac{\text{Jumlah bermukim}}{\text{Jumlah santri seluruhnya}}$$

Jumlah santri sekolah dan mukim = rasio santri mukim × Jumlah santri sekolah

$$\text{Faktor Koreksi} = \frac{\text{Jumlah santri sekolah dan mukim}}{\text{Jumlah penduduk umur 7 tahun ke atas}}$$

Sedangkan nilai HLS dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan

HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

FK = Faktor Koreksi Pesantren

E_i^t = Jumlah Penduduk Usia i yang bersekolah pada tahun t

P_i^t = Jumlah Penduduk Usia i pada tahun t

i = Penduduk usia (a, a+1, ..., n)

d. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita ini dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100.

Penghitungan paritas daya beli pada IPM metode baru ini menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan.

Pada IPM metode lama, untuk menghitung paritas daya beli hanya menggunakan 27 komoditas. Dimana share 27 komoditas tersebut terus menurun dari 37,52 % pada tahun 1996 menjadi 24,66 % pada tahun 2012. Sedangkan pada IPM metode baru, penghitungan paritas daya beli dipilih 96 komoditas yang memberikan share sebesar 73,63 persen.



Gambar 1.4 Komoditas Perhitungan Paritas Daya Beli pada IPM

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru, 2016

Untuk menghitung nilai dari masing-masing indeks pembentuk IPM, UNDP telah menetapkan batas minimum dan batas maksimum yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada tahun 1990, batas diperoleh dari hasil observasi, sedangkan pada tahun 1994 menggunakan suatu nilai batas tertentu. Mulai tahun 2010, penentuan nilai maksimum dan minimum menggunakan standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah.

Batas minimum pengeluaran per kapita disesuaikan merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten pada tahun 2010. Angka tersebut merupakan garis kemiskinan Kabupaten Tolikara Provinsi Papua pada tahun 2010. Sedangkan batas maksimum pengeluaran per kapita disesuaikan adalah nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2015 (akhir RPJPN), yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 1.1 Nilai Minimum dan Maksimum IPM Metode Baru

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Tahun	20	20	85	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP US\$)	1.007.436 (Rp)	107.721 (PPP US\$)	26.572.352 (Rp)

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru, 2016

1.3. Penghitungan IPM Metode Baru

Berdasarkan berbagai uraian dan rumus yang telah dijabarkan di atas, maka IPM metode baru dirumuskan sebagai:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}}$$

1.4. Klasifikasi Pembangunan Manusia

Dalam upaya untuk membandingkan antar wilayah, dibentuklah klasifikasi IPM. Pengklasifikasian pembangunan manusia bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia. Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu:



Gambar 1.6 Klasifikasi Capaian IPM

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Metode Baru, 2016

1.5. Mengukur Kecepatan Pembangunan Manusia

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia, dan untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

Keterangan:

IPM_t = IPM suatu wilayah pada tahun ke t

IPM_{t-1} = IPM suatu wilayah pada tahun ke t-1

BAB II

Perkembangan Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan

<https://sulsu.ac.id>

BAB II

Perkembangan Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan

2.1. Posisi Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil penghitungan BPS, IPM Sulawesi Selatan tahun 2022 sebesar 72,82. Capaian ini merupakan agregasi dari tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Guna menghitung dimensi umur panjang dan hidup sehat, digunakan indikator umur harapan hidup saat lahir. Saat ini, umur harapan hidup saat lahir di Sulawesi Selatan mencapai 70,97 tahun dengan kata lain bayi yang baru lahir di tahun 2022 diharapkan dapat bertahan hidup hingga usia 70,97 tahun.

Tabel 2.2 IPM Sulawesi Selatan dan Komponen, 2021-2022

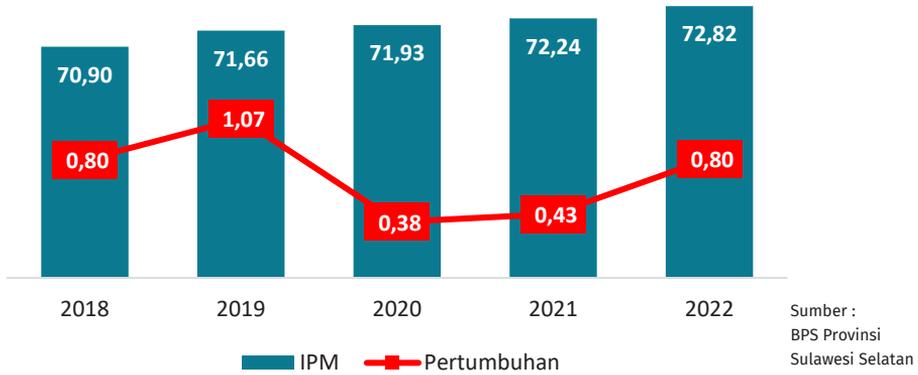
Komponen	2021	2022
Umur Harapan Hidup (tahun)	70,66	70,97
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,46	8,63
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,52	13,53
Pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan (Juta Rupiah/Orang/Tahun (PPP))	11,184	11,43
Indeks Pembangunan Manusia	72,24	72,82

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Sementara itu rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Secara rata-rata, penduduk Sulawesi Selatan usia 25 tahun ke atas sudah menempuh 8,63 tahun masa sekolah atau telah menyelesaikan pendidikan setara kelas 2 hingga kelas 3 SMP. Selain itu, rata-rata penduduk usia 7 tahun yang mulai bersekolah, diharapkan dapat mengenyam pendidikan hingga 13,53 tahun kedepan atau setara tamat Diploma I. Standar hidup layak Sulawesi Selatan yang diwakili oleh indikator pengeluaran perkapita yang disesuaikan mencapai 11,43 juta per kapita per tahun.

Pertumbuhan IPM Sulawesi Selatan

Pembangunan manusia di Sulawesi Selatan memperlihatkan perkembangan yang cukup signifikan dan konsisten dari tahun ke tahun menunjukkan membaiknya pembangunan manusia secara umum di Sulawesi Selatan. Dilihat dari trennya, IPM Sulawesi Selatan mengalami kenaikan. Dalam lima tahun (2018-2022) mengalami kenaikan 1,92 poin.

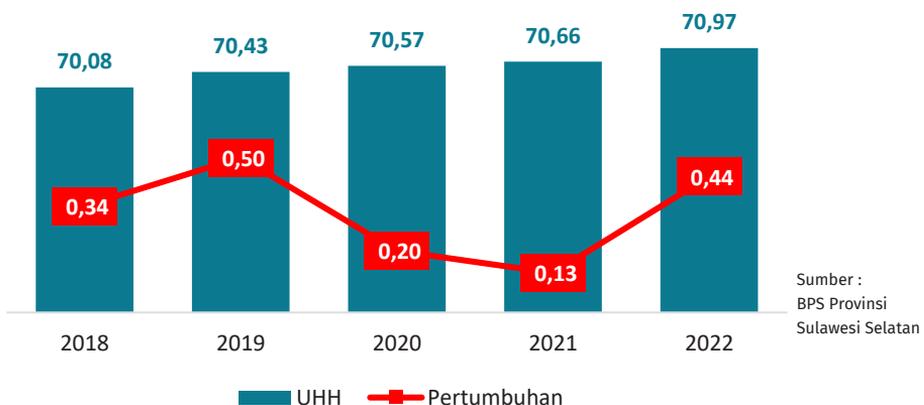


Gambar 2.1 Tren dan Pertumbuhan IPM Sulawesi Selatan, 2018-2022

Pertumbuhan IPM merupakan salah satu cara untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Pertumbuhan IPM di Sulawesi Selatan cenderung berfluktuasi namun tetap tumbuh positif setiap tahunnya. Secara tren pada tahun 2020 terjadi perlambatan pertumbuhan angka IPM dibandingkan tahun 2019, namun pada tahun 2021 mengalami percepatan pertumbuhan kembali begitu pula pada tahun 2022 ini.

Dimensi Kesehatan

Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh Umur Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator yang dapat mencerminkan derajat hidup suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan. Tren umur harapan hidup saat lahir dari tahun 2018 – 2022 cenderung stabil pada kisaran 70 tahun dan meningkat setiap tahunnya. Tahun 2020 saat tahun pertama terjadi pandemi covid19, umur harapan hidup di Sulawesi Selatan masih tetap tumbuh dari tahun sebelumnya namun tidak secepat pertumbuhan di tahun 2019 yang mencapai 0,50 persen. 2 tahun setelah pandemi terjadi, tren pertumbuhan UHH Sulawesi Selatan kembali mengalami percepatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

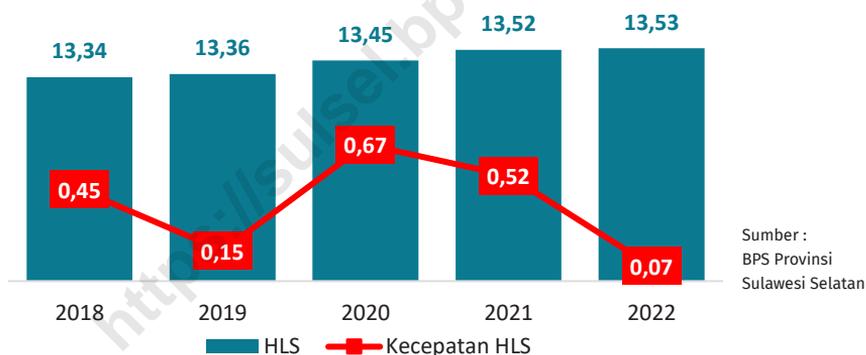


Gambar 2.2 Tren Umur Harapan Hidup (UHH) dan Pertumbuhannya di Sulawesi Selatan, 2018-2022

Kondisi peningkatan UHH menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup lebih lama semakin tinggi karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat. Kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat yang meningkat menjadi salah satu penyebab meningkatnya UHH di Sulawesi Selatan.

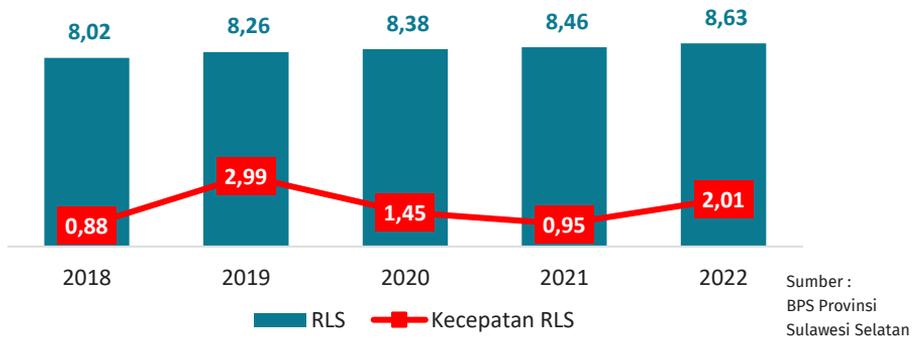
Dimensi Pendidikan

Dalam penghitungan IPM, dimensi pengetahuan merupakan agregasi dari angka harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah menghitung lamanya pendidikan yang ditempuh dari penduduk yang berusia 7 tahun ke atas, sedangkan rata-rata lama sekolah menghitung dari penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini di Sulawesi Selatan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.



Gambar 2.3 Tren Harapan Lama Sekolah Sulawesi Selatan, 2018-2022

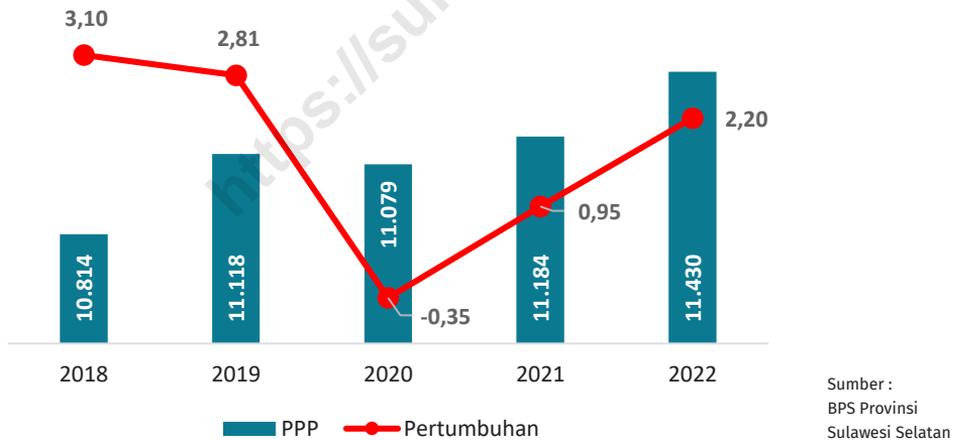
Pada periode tahun 2018-2022 tren Harapan Lama Sekolah mengalami pertumbuhan positif namun dengan tren perlambatan pertumbuhan pada 2 tahun terakhir ini. Pada tahun 2022, Harapan Lama Sekolah tumbuh sebesar 0,07 persen atau mengalami pertumbuhan paling rendah sejak tahun 2018. Sedangkan hal yang berbeda terjadi pada rata-rata lama sekolah yang mengalami percepatan pertumbuhan pada periode yang sama. Pada tahun 2022, rata-rata lama sekolah tumbuh sebesar 2,01 persen, pertumbuhan paling tinggi dibandingkan 2 tahun sebelumnya.



Gambar 2.4 Tren Rata-rata Lama Sekolah Sulawesi Selatan, 2018-2022

Standar Hidup Layak

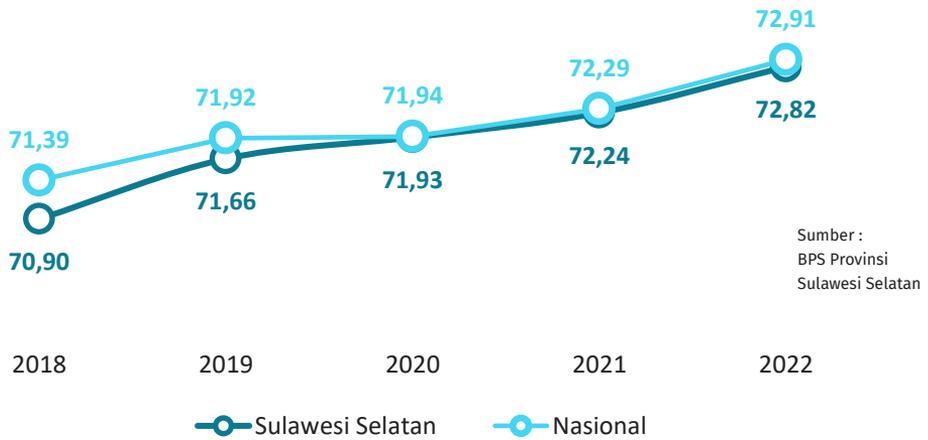
Tren pengeluaran per kapita disesuaikan di Sulawesi Selatan selama periode tahun 2016-2022 mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun dan di tahun 2020 dan 2021 tumbuh lebih rendah dibanding 5 tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita disesuaikan tumbuh positif sebesar 2,20 persen. Jika pada tahun 2016 pengeluaran per kapita penduduk berkisar sekitar 10,28 juta rupiah per tahun, maka pada tahun 2022 telah mencapai 11,430 juta rupiah per tahun.



Gambar 2.5 Tren Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah) dan Pertumbuhannya di Sulawesi Selatan, 2018-2022

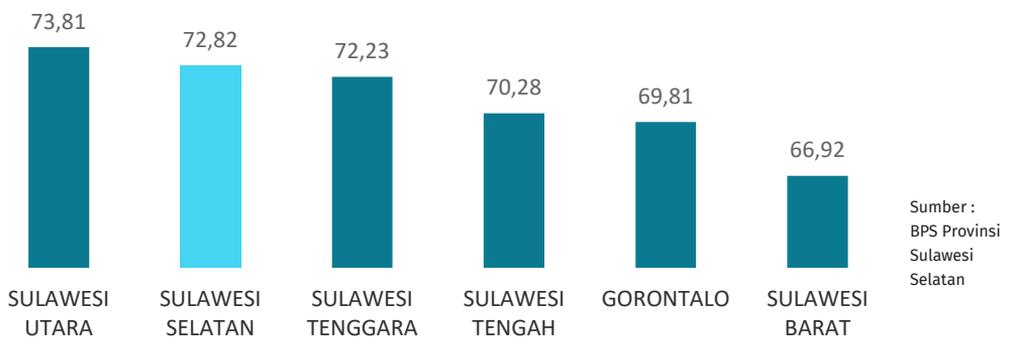
2.2. Status IPM Sulawesi Selatan

Hasil perhitungan pembangunan manusia di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 sebesar 72,82 berada di urutan ke 11 dibandingkan 34 provinsi lainnya. Peringkat ini masih sama dengan tahun sebelumnya dengan nilai IPM pada tahun 2021 sebesar 72,24. Selama 6 tahun terakhir ini pembangunan manusia Sulawesi Selatan berstatus tinggi dan secara konsisten meningkat setiap tahunnya hal ini selaras dengan tren capaian angka IPM nasional yang nilainya lebih tinggi dari IPM Sulawesi Selatan.



Gambar 2.6 Perbandingan IPM Sulawesi Selatan dengan Nasional, 2018-2022

Pulau Sulawesi secara administratif terbagi menjadi 6 Provinsi dengan Provinsi Sulawesi Utara memiliki capaian angka IPM paling tinggi dibandingkan dengan 5 provinsi lainnya. Adapun Sulawesi Selatan berada di urutan ke 2, satu peringkat lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi Sulawesi Tenggara dan di urutan selanjutnya ada provinsi Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. Capaian IPM Sulawesi Utara di tahun 2022 sebesar 73,81 lebih tinggi 0,99 poin dibandingkan IPM Sulawesi Selatan. Apabila dibandingkan dengan IPM Sulawesi Barat yang memiliki capaian IPM terendah perbedaannya juga cukup besar yaitu 6,89 poin lebih tinggi. Status pembangunan manusia di Pulau Sulawesi juga masih timpang, terdapat 2 provinsi yang berstatus pembangunan manusia “sedang” sementara 4 provinsi lainnya sudah berstatus “tinggi”, termasuk Provinsi Sulawesi Tengah yang berubah statusnya menjadi tinggi pada tahun 2022 dengan capaian IPM sebesar 70,28.



Gambar 2.7 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Pulau Sulawesi, 2022

Perbedaan Capaian IPM di pulau Sulawesi disebabkan oleh perbedaan capaian masing-masing komponen pembentuknya. Meski capaian IPM Sulawesi Utara lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya, terdapat beberapa komponen seperti Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan yang lebih rendah dibandingkan provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.

Tabel 2.2 IPM dan Komponen Pembentuk IPM Provinsi di Pulau Sulawesi, 2022

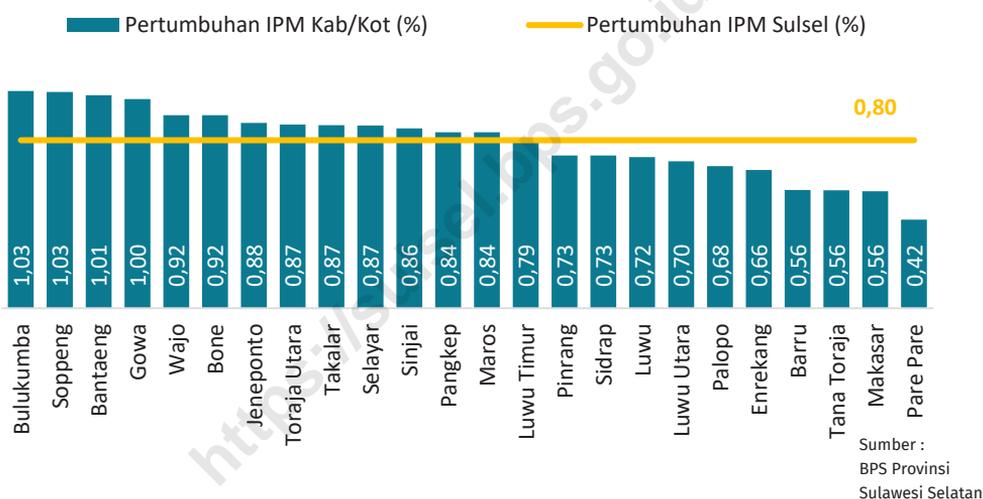
Provinsi	UHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah PPP)	IPM
Sulawesi Utara	72,08	12,95	9,68	11.179	73,81
Sulawesi Tengah	68,93	13,32	8,89	9.696	70,28
Sulawesi Selatan	70,97	13,53	8,63	11.430	72,82
Sulawesi Tenggara	71,37	13,69	9,25	9.708	72,23
Gorontalo	68,51	13,12	8,02	10.687	69,81
Sulawesi Barat	65,63	12,87	8,08	9.358	66,92
Indonesia	71,85	13,10	8,69	11.479	72,91

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Rata-rata umur harapan hidup di Pulau Sulawesi sebesar 69,58 tahun. Selisih umur harapan hidup tertinggi dan terendah sebesar 6,45 tahun yang berarti umur harapan hidup bayi yang lahir di tahun 2022 di provinsi Sulawesi Utara lebih lama 6,45 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir di Provinsi Sulawesi Barat. Pada bidang pendidikan rata-rata harapan lama sekolah penduduk di Pulau Sulawesi sebesar 13,25 tahun. Penduduk usia 7 tahun ke atas di Provinsi Sulawesi tenggara diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan selama 13,69 tahun atau setara dengan Diploma I, merupakan angka harapan lama sekolah paling tinggi dibandingkan dengan lima provinsi lain di Sulawesi. Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo juga mempunyai UHH setara dengan Diploma I. Adapun di Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat diharapkan dapat menyelesaikan pendidikan hingga lulus SMA sederajat. Untuk Rata-rata lama sekolah, penduduk yang telah berusia 25 tahun ke atas, atau mereka yang lahir sebelum tahun 1998, pada tahun 2022 di Pulau Sulawesi sebagian besar telah menyelesaikan pendidikan setingkat kelas 2-3 SMP sederajat, yang berarti belum mencapai target wajib belajar 9 tahun yang pernah digalakkan pemerintah. Capaian dimensi standar hidup layak yang diukur dari besarnya pengeluaran perkapita yang disesuaikan paling tinggi ada di Provinsi Sulawesi Selatan sedangkan yang paling rendah masih di Provinsi Sulawesi Barat.

2.3. Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota

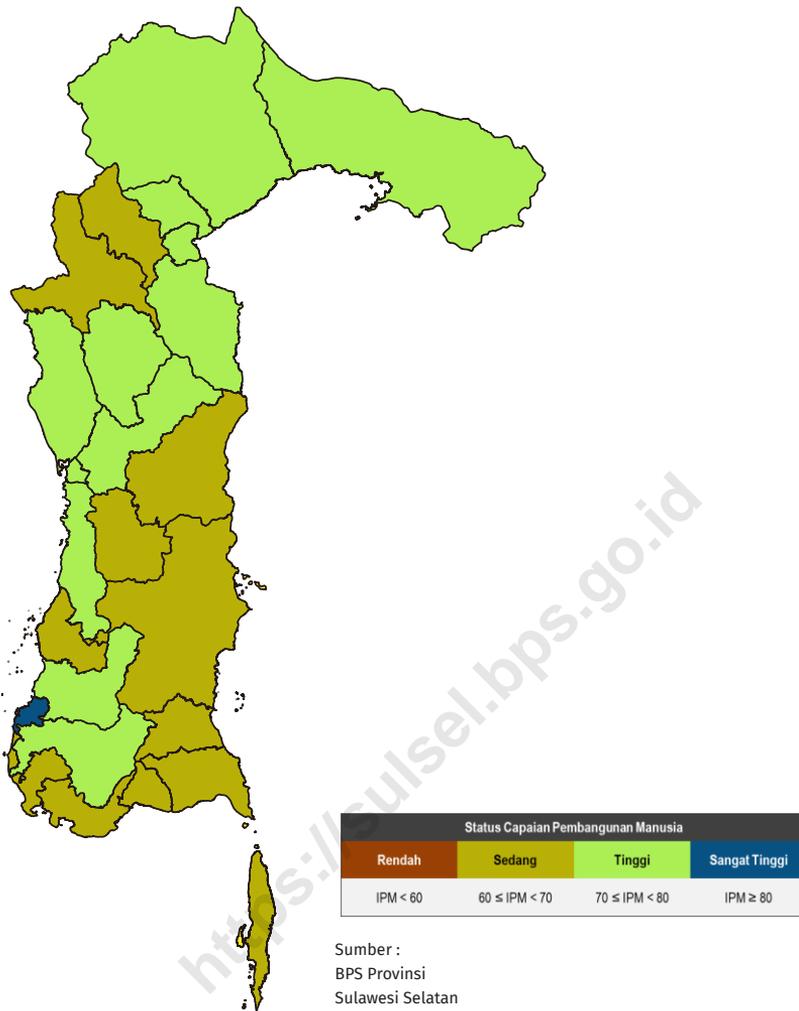
Pada tahun 2022, IPM tertinggi untuk level kabupaten/kota masih dicapai oleh Kota Makassar sebesar 83,12, kemudian disusul oleh Kota Palopo (78,91) dan Kota Parepare (78,54). Tiga wilayah kotamadya di Sulawesi Selatan ini menunjukkan capaian IPM yang lebih tinggi dibandingkan wilayah kabupaten lainnya. Sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar masih menjadi pusat dari seluruh kegiatan, baik pendidikan, perekonomian, hiburan, pemerintahan dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana Kota Makassar cukup memadai dalam mendukung pencapaian pembangunan manusia. Akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan sangat mudah dan terjangkau. Sedangkan untuk capaian IPM terendah adalah Kabupaten Takalar (68,31), Kabupaten Bone (67,01) dan Kabupaten Jeneponto (65,13).



Gambar 2.8 Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota terhadap IPM Sulawesi Selatan, 2022 (persen)

Pertumbuhan IPM menggambarkan kecepatan pembangunan manusia pada suatu wilayah. Selama periode 2021-2022, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Soppeng menempati posisi pertama dengan pertumbuhan IPM paling cepat sebesar 1,03 persen. Kemudian disusul oleh Kabupaten Bantaeng sebesar 1,01 persen dan Kabupaten Gowa sebesar 1,00 persen. Sedangkan pertumbuhan IPM terendah terdapat di Kota Pare-pare sebesar 0,42 persen, Kota Makassar, Tana Toraja, dan Barru sebesar 0,56 persen.

Selama periode tahun 2021-2022 terdapat 3 kabupaten yang mengalami perubahan status dari pembangunan IPM sedang ke tinggi yaitu Bulukumba, Wajo, dan Toraja Utara. Sebagian besar status pembangunan manusia kabupaten/kota di Sulawesi Selatan berada pada kategori tinggi ada sebanyak 14 Kabupaten/Kota, sedangkan yang berstatus sedang ada 9 Kabupaten, dan satu-satunya kota yang berstatus IPM sangat tinggi dicapai oleh Kota Makassar.



Gambar 2.9 Peta Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2022

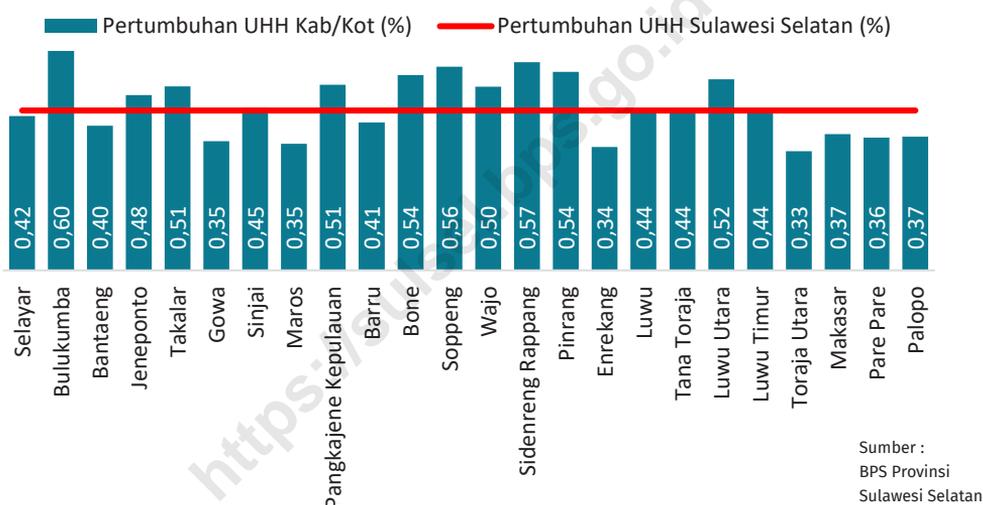
Tabel 2.3 Status Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, 2021-2022

Tahun	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
2021	Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Sinjai, Pangkep, Bone, Soppeng, Wajo, Tana Toraja, Toraja Utara	Gowa, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Enrekang, Luwu, Lutra, Lutim, Pare-pare, Palopo	Makassar
2022	Selayar, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Sinjai, Pangkep, Bone, Soppeng, Tana Toraja	Bulukumba, Gowa, Maros, Barru, Sidrap, Pinrang, Enrekang, Luwu, Lutra, Lutim, Pare-pare, Palopo, Wajo, Toraja Utara	Makassar

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

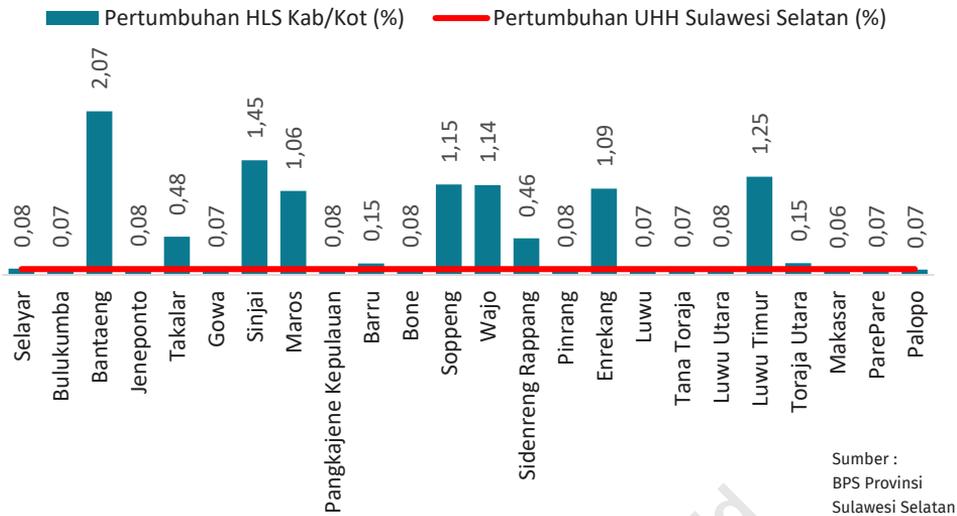
Capaian Dimensi Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota

Umur Harapan Hidup Sulawesi Selatan pada tahun 2022 tumbuh sebesar 0,44 persen dibandingkan tahun 2021. Terdapat 14 kabupaten yang mampu mencapai pertumbuhan UHH yang setara maupun lebih tinggi dari pertumbuhan UHH Sulawesi Selatan. Salah satunya yang paling tinggi adalah Kabupaten Bulukumba yang tumbuh sebesar 0,60 persen yang berarti harapan hidup bayi baru lahir di Bulukumba meningkat 0,41 tahun di tahun 2022 menjadi 68,51 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Kecepatan pertumbuhan paling rendah justru terjadi di Kabupaten Toraja Utara, meskipun mempunyai angka UHH tertinggi di Sulawesi Selatan. Tahun 2022, pertumbuhan UHH Toraja Utara hanya sebesar 0,33 persen atau meningkat 0,24 tahun dibandingkan tahun sebelumnya.



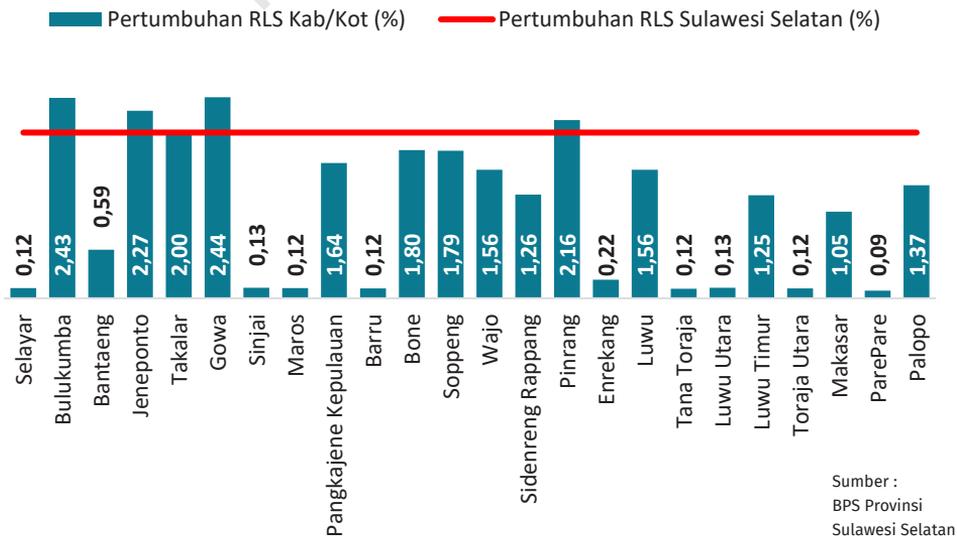
Gambar 2.10 Pertumbuhan Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2022

Dimensi pengetahuan Sulawesi Selatan di tahun 2022 masih menunjukkan pertumbuhan yang positif walaupun pertumbuhannya tidak secepat tahun-tahun sebelumnya, Harapan Lama Sekolah (HLS) Sulawesi Selatan 2022 tumbuh sebesar 0,07 persen. Terdapat 7 kabupaten/kota yang pertumbuhan HLS nya lebih dari 1 persen juga lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan HLS Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Bantaeng, Sinjai, Maros, Soppeng, Wajo, Enrekang, dan Luwu Timur. HLS tertinggi dicapai oleh Kota Makassar sebesar 15,59 tahun, disusul oleh Kota Palopo sebesar 15,10 tahun, dan Kota Parepare sebesar 14,52 tahun.



Gambar 2.11 Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2022

Komponen lain dari dimensi pengetahuan yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Tingginya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang telah ditamatkan.

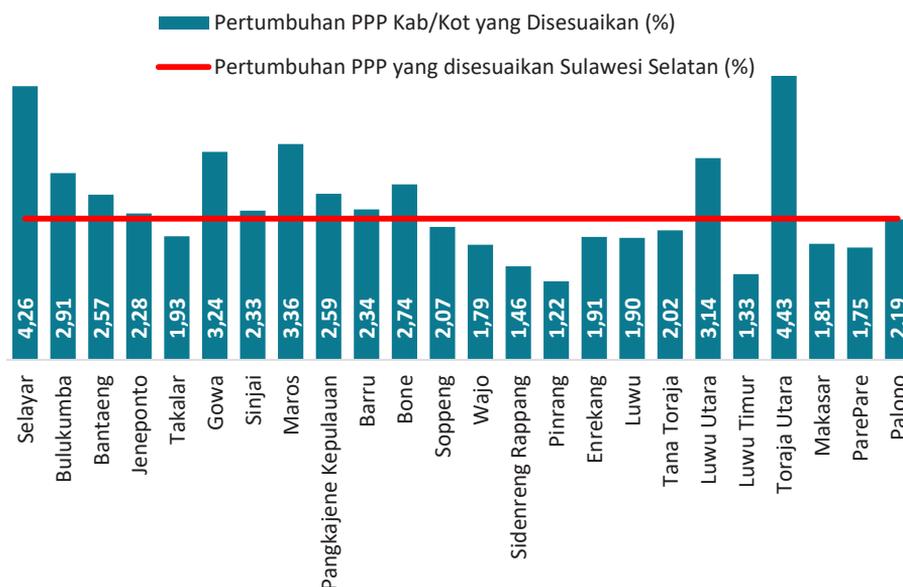


Gambar 2.12 Pertumbuhan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan tahun 2022

Pada tahun 2022 RLS Sulawesi Selatan sebesar 8,63 tahun tumbuh 2,01 persen dari tahun sebelumnya. Artinya rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Sulawesi Selatan adalah selama 8,63 tahun atau setara dengan jenjang SMP kelas VIII. Pertumbuhan RLS tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bulukumba sebesar 2,43 persen. RLS Kabupaten Jeneponto, Gowa, Takalar, dan Pinrang juga tumbuh tinggi lebih dari 2 persen di tahun 2022. Sedangkan pertumbuhan RLS paling rendah terjadi di Kota Pare-pare yang hanya sebesar 0,09 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Capaian RLS paling tinggi pada tahun 2022 adalah Kota Makassar sebesar 11,55 tahun. Dua kota lainnya yang mencapai angka RLS di atas 10 tahun yaitu Kota Palopo (11,09) dan Kota Pare-pare (10,66). Artinya penduduk usia 25 tahun ke atas yang tinggal di ketiga kota ini rata-rata telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA kelas XI. Sedangkan RLS terendah pada tahun 2022 adalah Kabupaten Jeneponto sebesar 6,75 tahun yang artinya penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Jeneponto rata-rata telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang jenjang SMP kelas VII.

Dimensi standar hidup layak ditunjukkan melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan (Purchasing Power Parity/PPP). PPP Sulawesi Selatan tahun 2022 mencapai Rp.11,43 juta (PPP per kapita per tahun) atau tumbuh sebesar 2,20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya pengeluaran 1 penduduk di Sulawesi Selatan selama satu tahun penuh adalah sebesar Rp 11,08 Juta pada tahun 2022. Kabupaten dengan pertumbuhan PPP paling tinggi adalah Toraja Utara sebesar 4,43 persen, disusul oleh Selayar sebesar 4,26 persen. Adapun pertumbuhan PPP yang terendah adalah Kabupaten Pinrang sebesar 1,22 persen.



Gambar 2.13 Pertumbuhan Pengeluaran perkapita yang disesuaikan Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan, periode 2022 (Ribu Rupiah)

Terdapat 10 kabupaten/kota yang capaian PPP tahun 2022 lebih tinggi dari PPP Sulawesi Selatan. PPP tertinggi ada di Kota Makassar sebesar 17,41 juta per kapita per tahun dengan pertumbuhan 1,81 persen dibandingkan tahun sebelumnya. PPP di Kota Makassar 2,3 kali lebih besar daripada PPP di Tana Toraja yang sebesar Rp 7,5 Juta sekaligus paling rendah diantara 24 Kabupaten/ Kota lainnya.

<https://sulsel.bps.go.id>

BAB III

Kemajuan Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan Capaian dan Tantangan

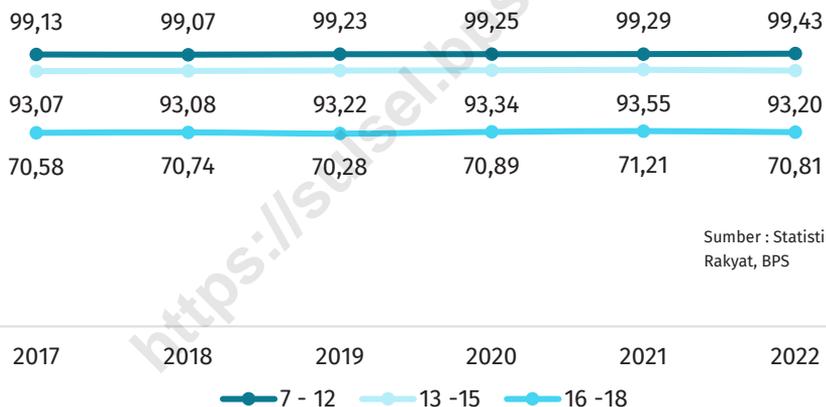
<https://sulsu.ac.id>

BAB III

Kemajuan Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan Capaian dan Tantangan

3.1. Capaian dan Tantangan Bidang Pendidikan

Pemerataan terhadap akses pendidikan di suatu wilayah dapat diukur dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS menunjukkan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk kelompok umur tersebut. Serta digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan.



Gambar 3.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Provinsi Sulawesi Selatan, 2017-2022 (persen)

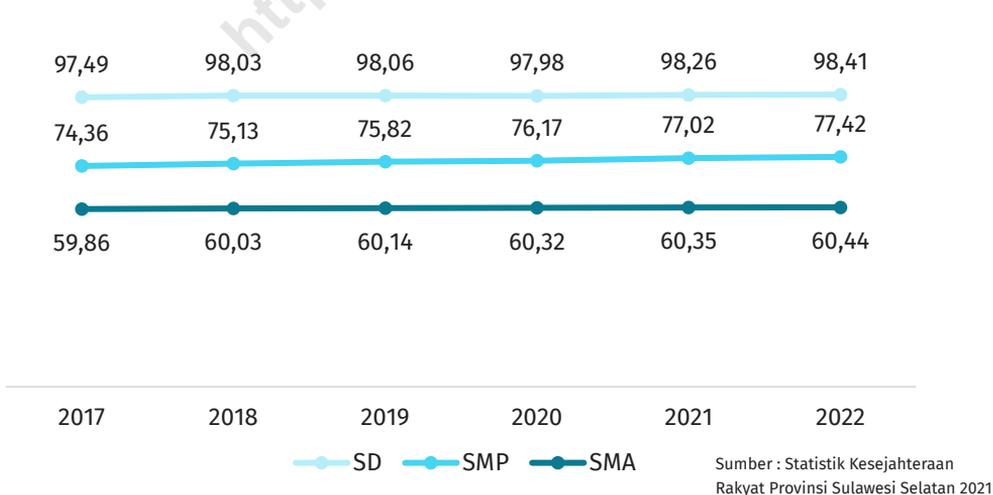
APS usia 7 – 12 tahun (setara SD/ sederajat) di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 berdasarkan data hasil olah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) mencapai 99,43 persen yang artinya 99,43 persen dari penduduk yang berusia 7-12 tahun di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 sedang bersekolah. Semakin tinggi angka APS maka akan meningkatkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan untuk jenjang Sekolah Dasar sederajat. APS 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,14 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

APS usia 13-15 tahun (setara SMP/ sederajat) di provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 mencapai 93,20 persen lebih rendah daripada usia SD/ sederajat. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, APS usia 13 – 15 tahun mengalami penurunan sebesar 0,35 poin, hal ini disebabkan penurunan partisipasi sekolah di daerah perkotaan sebesar 1,22 persen. APS usia 16 – 18 tahun (setara SMA/ sederajat) di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 mencapai 70,81 persen. Angka

ini lebih rendah lagi dibandingkan dengan APS usia 7 – 12 tahun dan APS usia 13 – 15 tahun. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, APS usia 16 – 18 tahun ini juga mengalami penurunan sebesar 0,40 poin akibat dari penurunan partisipasi sekolah laki-laki maupun perempuan sebesar 1,05 persen di daerah perkotaan dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain menggunakan APS sebagai indikator untuk mengukur pemerataan akses terhadap pendidikan, kita juga dapat menggunakan indikator Angka Partisipasi Murni (APM). APM menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.

Angka Partisipasi Murni (APM) usia 7 – 12 tahun (SD/ sederajat) di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 mencapai 98,41 persen meningkat 0,15 persen dibandingkan tahun 2021. Hal ini menunjukkan 98 dari 100 anak usia 7-12 tahun di Sulawesi Selatan pada tahun 2022 sudah bersekolah tepat waktu pada jenjang SD sederajat. Selanjutnya, APM usia 13 – 15 tahun (SMP/ sederajat) pada tahun 2022 mencapai 77,42 persen. Capaian ini jauh lebih rendah daripada APM SD. Masih terdapat sekitar 22,58 persen anak usia 13 – 15 tahun yang tidak bersekolah pada jenjang SMP. Begitu pula dengan capaian APM SMA tahun masih berada pada kisaran 60,44 persen atau terdapat sekitar 39,56 persen anak usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah pada jenjang SMA sederajat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih harus meningkatkan program yang lebih komprehensif agar pendidikan dasar hingga 12 tahun dapat dirasakan oleh semua masyarakat.



Gambar 3.2 Angka Partisipasi Murni (APM) di Provinsi Sulawesi Selatan, 2017-2022 (persen)

3.2. Capaian dan Tantangan Bidang Kesehatan

Pada tahun 2022 capaian UHH Sulawesi Selatan sebesar 70,97 tahun. Meningkatkan 0,44 persen dibanding tahun sebelumnya. Keberhasilan dalam melakukan pembangunan di bidang kesehatan ditandai dengan penduduk yang hidup dalam lingkungan sehat, memiliki derajat kesehatan yang tinggi, kesadaran yang tinggi, kemauan yang keras dan kemampuan hidup sehat.

Berdasarkan hasil olah Susenas diperoleh indikator yang mendukung peningkatan capaian UHH Sulawesi Selatan yaitu usia hamil pada perkawinan pertama dan penolong kelahiran/tempat melahirkan. Kesadaran perempuan untuk memilih menggunakan fasilitas kesehatan sebagai tempat untuk melahirkan juga semakin membaik pada periode 2022. Persentase perempuan dan tempat melahirkan anak lahir hidup yang terakhir pada fasilitas kesehatan sebesar 95,44 persen pada tahun 2021, meningkat sebesar 0,89 poin pada tahun 2022 (96,33 persen). Sementara yang memilih tempat melahirkan di rumah dan lainnya pada tahun 2022 sebesar 4,56 persen, menurun 0,89 poin pada tahun 2022 (3,67 persen). Hampir seluruh Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan memiliki persentase perempuan dan tempat melahirkan anak lahir hidup yang terakhir pada fasilitas kesehatan sebesar 100 persen pada tahun 2022, kecuali Takalar dan Pinrang.

3.3. Capaian dan Tantangan Bidang Ekonomi

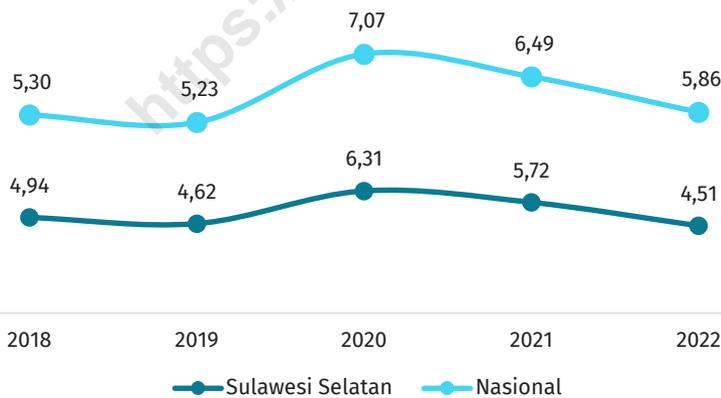
Berdasarkan hasil olah Susenas September Maret 2017 – September 2022 tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan mengalami fluktuasi baik dari jumlah maupun persentase. Dalam 5 tahun terakhir perseentase penduduk miskin mengalami penurunan paling rendah pada September 2021 menjadi sebesar 8,53 persen. Namun pada Maret 2022 persentase penduduk miskin kembali naik sebesar 8,63 persen atau sebanyak 777,44 ribu jiwa. Hingga pada periode September 2022 persentase penduduk miskin masih meningkat menjadi 8,66 persen atau sebanyak 782,32 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin perkotaan September 2022 meningkat 1,08 ribu lebih banyak daripada peningkatan jumlah penduduk miskin di pedesaan dibandingkan periode September 2021.



Sumber : Profil Kemiskinan September 2022, BPS

Gambar 3.3 Jumlah dan Persentase penduduk Miskin Sulawesi Selatan 2017-2022

Disisilain tingkat pengangguran terbuka tahun 2022 menurun dibandingkan 4 tahun terakhir. Apabila dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka nasional, maka tingkat pengangguran terbuka Sulawesi Selatan dari tahun 2018 sampai 2022, sudah lebih rendah dibandingkan dengan nasional. Pada tahun 2020 dan 2021 jumlah penduduk miskin dan Tingkat Pengangguran Terbuka masih lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya salah satunya akibat dampak dari Covid-19 yang melanda sejak awal tahun 2020.



Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar 3.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Sulawesi Selatan Periode Agustus Tahun 2018-2022 (Persen)

BAB IV

Disparitas Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan

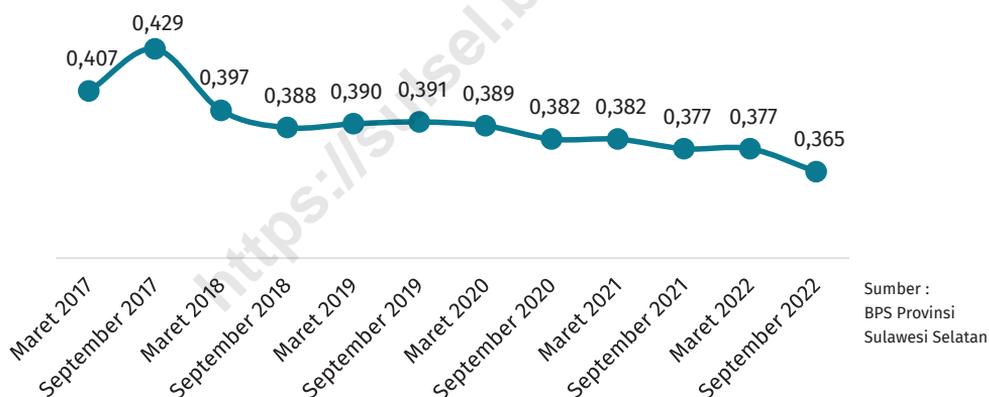
<https://sulsel.bps.go.id>

BAB IV

Disparitas Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan

4.1. Disparitas Antarindividu

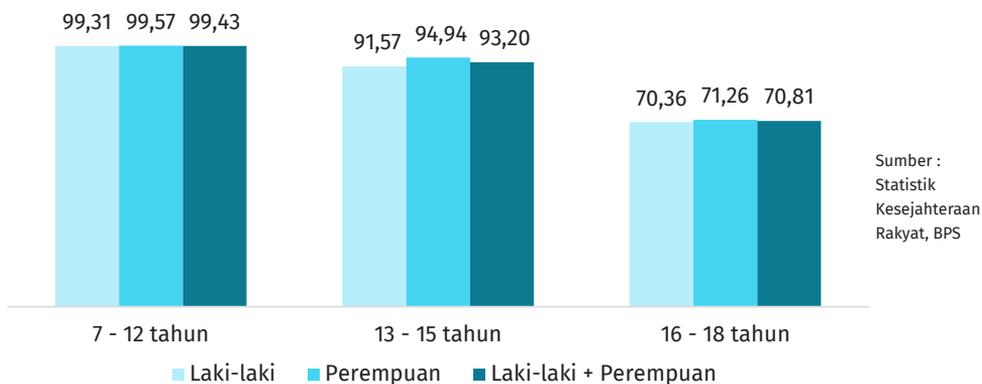
Kesenjangan pembangunan manusia yang terjadi antar individu tidak dapat dihindari. Individu harus dipastikan memiliki kesempatan yang sama dalam memperluas pilihan-pilihannya. Sebagian penduduk dapat memperoleh pilihan-pilihannya, sementara yang lain berada dalam keterbatasan pilihan untuk mengakses sumber daya. Gini rasio pengeluaran menunjukkan ketimpangan di bidang ekonomi. Gini rasio di Sulawesi Selatan kondisi September 2022 mencapai 0,365, turun jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 serta September 2021. Hal ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran antar individu yang masih melebar dan termasuk kategori sedang.



Gambar 4.1 Tingkat Ketimpangan (Gini Rasio) di Sulawesi Selatan Maret 2017 – September 2022

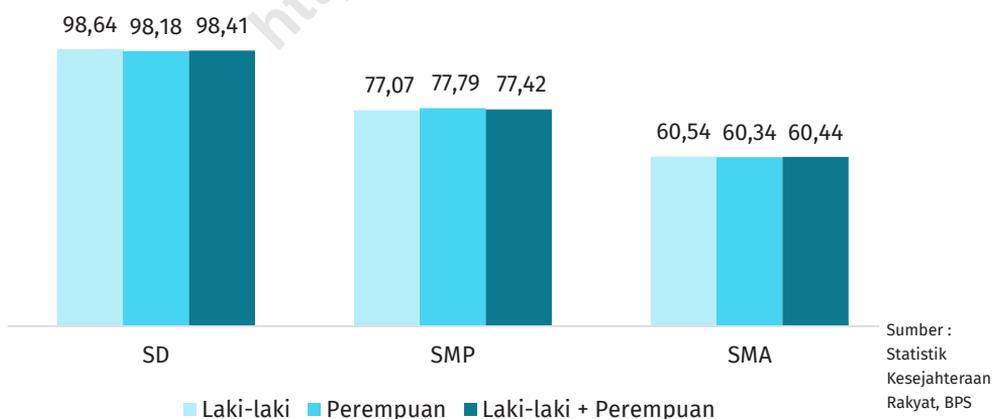
4.2. Disparitas Antargender

Kondisi yang ideal dalam pembangunan manusia yang diharapkan adalah kelompok penduduk laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama untuk berperan dalam pembangunan, memegang kendali atas sumber daya pembangunan yang ada serta menerima manfaat dari pembangunan yang setara dan adil. Ketimpangan gender dari sisi pendidikan masih terjadi saat ini. Beberapa indikator pendidikan telah mencatat capaian perempuan telah melampaui laki-laki diantaranya angka partisipasi sekolah (APS) dan angka partisipasi murni (APM).



Gambar 4.2 Angka Partipasi Sekolah (APS) Menurut Jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Selatan, 2022 (persen)

Pada tahun 2022 APS penduduk perempuan lebih tinggi daripada laki-laki pada seluruh tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA. Perbedaan paling besar pada tingkat SMP sebesar 3,37 persen. Sedangkan angka partisipasi murni tahun 2022 menunjukkan capaian perempuan yang lebih rendah dibanding laki-laki pada jenjang pendidikan SD dan SMA. Sementara untuk jenjang pendidikan SMP, APM laki-laki lebih rendah dibanding perempuan. Adapun berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022 mencatat bahwa TPAK laki-laki sebesar 82,91 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 50,46 persen. Dibandingkan Agustus 2021, TPAK laki-laki dan perempuan mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 1,87 persen poin dan 1,04 persen poin.



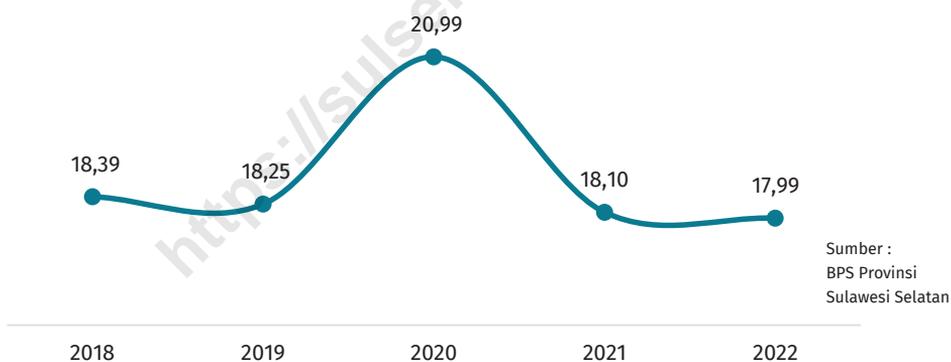
Gambar 4.3 Angka Partipasi Murni (APM) Menurut Jenis kelamin di Provinsi Sulawesi Selatan, 2022 (persen)

4.3. Disparitas Antawilayah

Pembangunan manusia yang terus bergulir hingga saat ini masih menyisakan ketimpangan antarwilayah. Ditandai dengan status pembangunan manusia yang berbeda, beberapa daerah masih berstatus sedang sedangkan yang lain sudah berstatus tinggi bahkan Kota Makassar berstatus sangat tinggi. Kondisi wilayah, sosial, dan budaya yang berbeda menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan manusia.

Disparitas antar Kabupaten/Kota.

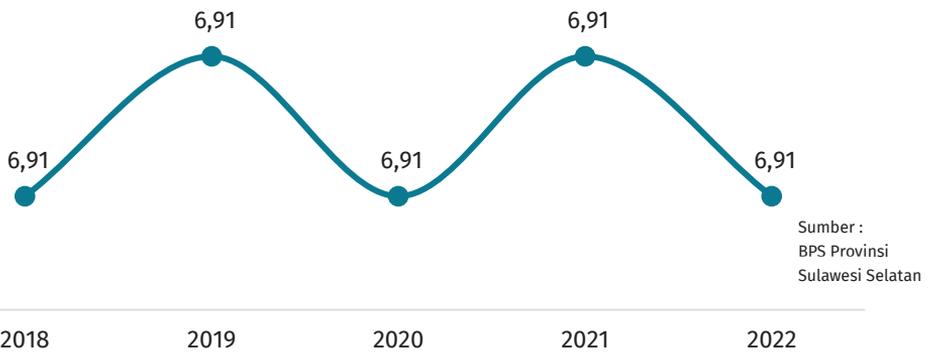
Disparitas antar kabupaten/kota terlihat dari capaian IPM Kota Makassar (IPM = 83,12) dengan Kabupaten Jeneponto (IPM = 65,13), pada tahun 2022. Selisih capaian IPM kedua kabupaten dan kota tersebut di tahun 2022 mencapai 17,99 poin. Kesenjangan yang paling tinggi antara Kota Makassar dengan Kabupaten Jeneponto terdapat pada komponen pengeluaran perkapita yang disesuaikan, Kota Makassar 1,85 kali lebih tinggi dari Jeneponto. Selanjutnya rata-rata lama sekolah di Jeneponto juga 1,771 kali lebih rendah dibandingkan Kota Makassar.



Gambar 4.4 Selisih IPM Kota Makassar dan Kabupaten Jeneponto, 2018-2022

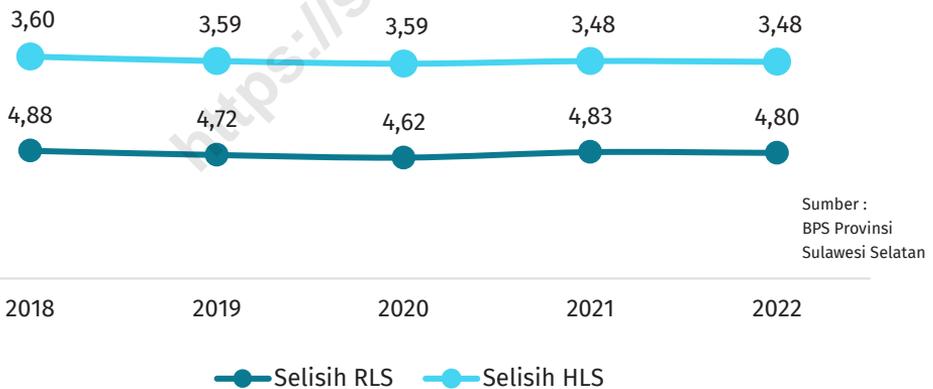
Menilik pada tren, selama tahun 2018 hingga 2022, perbedaan IPM kedua kabupaten/kota tersebut sempat meningkat di tahun 2020 namun kembali menurun pada tahun 2021 dan 2022. Hal ini menunjukkan bahwa disparitas antara kabupaten/kota makin besar selama pandemi covid-19 dan menunjukkan perbaikan pula seiring meredanya dampak covid dalam 2 tahun terakhir.

Jika dilihat menurut dimensi penyusun IPM, pada dimensi kesehatan, capaian UHH tertinggi pada tahun 2022 adalah Kabupaten Tana Toraja (73,72 tahun) dan terendah adalah Kabupaten Jeneponto (66,81 tahun). Selisih antara kedua wilayah ini mencapai 6,91 tahun pada tahun 2022, masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kecepatan pertumbuhan UHH antar kabupaten/kota di Sulsel juga tidak mengalami perbedaan yang signifikan dan berada dalam rentang 0,33-0,60 persen.



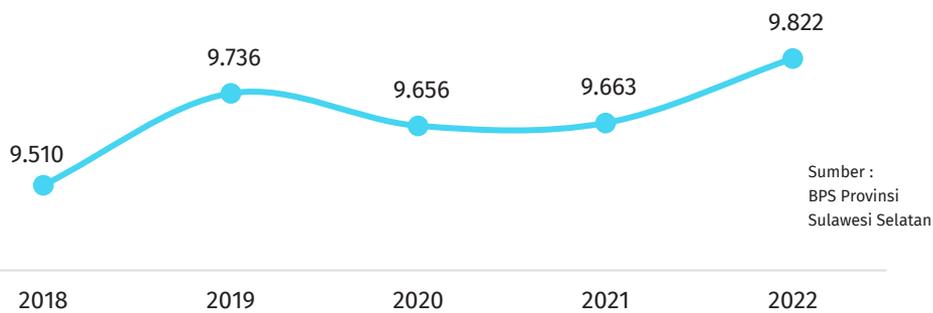
Gambar 4.5 Selisih Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Jeneponto, 2018-2022 (Tahun)

Pada dimensi pendidikan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah masih menunjukkan adanya kesenjangan antara kabupaten/kota. Pada komponen harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) capaian tertinggi pada tahun 2022 adalah Kota Makassar dan terendah Kabupaten Jeneponto. Selama periode tahun 2018 hingga 2022 tren menunjukkan kesenjangan yang menurun pada harapan lama sekolah. Sementara rata-rata lama sekolah memperlihatkan peningkatan kesenjangan di tahun 2021 dan mulai menurun juga di tahun 2022.



Gambar 4.6 Selisih Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Makassar dan Kabupaten Jeneponto, 2018-2022 (Tahun)

Pada dimensi ekonomi, yang ditunjukkan dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan, juga masih menunjukkan adanya disparitas antar kabupaten/kota. Capaian pengeluaran per kapita pada tahun 2022 tertinggi adalah Kota Makassar dan terendah adalah Kabupaten Tana Toraja. Selama periode tahun 2018 hingga 2022, disparitas pada dimensi ekonomi antara Kota Makassar dan Kabupaten Tana Toraja cenderung semakin melebar. Diperlukan upaya-upaya yang tepat sasaran untuk meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya di Kabupaten Tana Toraja.



Gambar 4.7 Selisih Pendapatan Pengeluaran per Kapita (PPP) Kota Makassar dan Kabupaten Tana Toraja, 2018-2022 (Ribu Rupiah)

<https://sulsel.bps.go.id>

BAB V

Daya Beli Masyarakat

<https://sulsel.bps.go.id>

BAB V

Daya Beli Masyarakat

5.1. Isu Pelemahan Daya Beli

Memasuki tahun ke-3 setelah pandemi Covid-19 sejak pertama kali melanda di tahun 2020, perekonomian Sulawesi Selatan secara umum mulai kembali tumbuh positif. Dalam hal ini konsumsi rumah tangga masih menjadi komponen dengan proporsi paling besar dalam ekonomi yang dihitung dari sisi pengeluaran. Dari tabel 5.1 terlihat bahwa peranan konsumsi rumah tangga dalam perekonomian Sulawesi Selatan selalu lebih dari 50 persen. Daya beli masyarakat yang meningkat dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan mengingat kontribusinya yang sangat tinggi dibanding komponen PDRB lainnya. Kabar baiknya persentase proporsi konsumsi rumah tangga dari tahun ke tahun menunjukkan tren penurunan dan beralih pada peningkatan proporsi PMTB yang mengindikasikan investasi di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan.

Tabel 5.1 Distribusi PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Pengeluaran 2019 - Q3 2022 (persen)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022
Konsumsi rumah tangga	54,42	55,22	53,37	55,12	54,14	51,20
Konsumsi LNPRT	1,62	1,57	1,47	1,56	1,48	1,51
Konsumsi Pemerintah	9,80	9,64	9,43	5,39	8,13	8,79
PMTB	37,36	39,43	39,04	37,56	35,94	38,85
Perubahan Inventori	0,10	0,14	0,08	0,37	0,18	0,60
Ekspor	8,79	9,51	9,64	11,48	13,56	12,68
Impor	12,08	15,51	13,03	11,49	13,42	13,65
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Kemampuan konsumsi masyarakat berkaitan dengan daya beli yang dipengaruhi berbagai fenomena ekonomi sepanjang tahun 2022. Seiring dengan adanya kenaikan harga minyak dunia, pemerintah berupaya menurunkan harga BBM agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Subsidi BBM dan anggaran kompensasi tahun 2022 juga naik tiga kali lipat. Pemerintah sangat menekankan belanja APBN 2022 dialokasikan bagi kepentingan perlindungan sosial kepada masyarakat dari dampak pasca-Covid-19, terutama untuk mendongkrak konsumsi atau daya beli masyarakat. Realisasi diarahkan utamanya untuk penyaluran subsidi, kompensasi BBM dan listrik, dan pembayaran pensiun termasuk THR dan pensiun 13, serta jaminan kesehatan ASN (Indonesia.go.id).



Gambar 5.1 Laju Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga di Sulawesi Selatan (y-on-y), 2020-2022 (persen)

Jika dicermati lebih lanjut untuk kondisi triwulanan, laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga sepanjang tahun 2020 - Q1 2021 menunjukkan penurunan yang signifikan. Pada triwulan I 2021, konsumsi rumah tangga di Sulawesi Selatan tumbuh negatif sebesar 3,61 persen (jika dibandingkan triwulan I 2020), kemudian mengalami percepatan pertumbuhan di triwulan berikutnya sebesar 7,43 persen, dimana triwulan ini pembatasan kegiatan masyarakat mulai dilonggarkan. Hingga kondisi terakhir di triwulan 3 tahun 2022 konsumsi rumah tangga tetap tumbuh positif dibandingkan tahun sebelumnya.

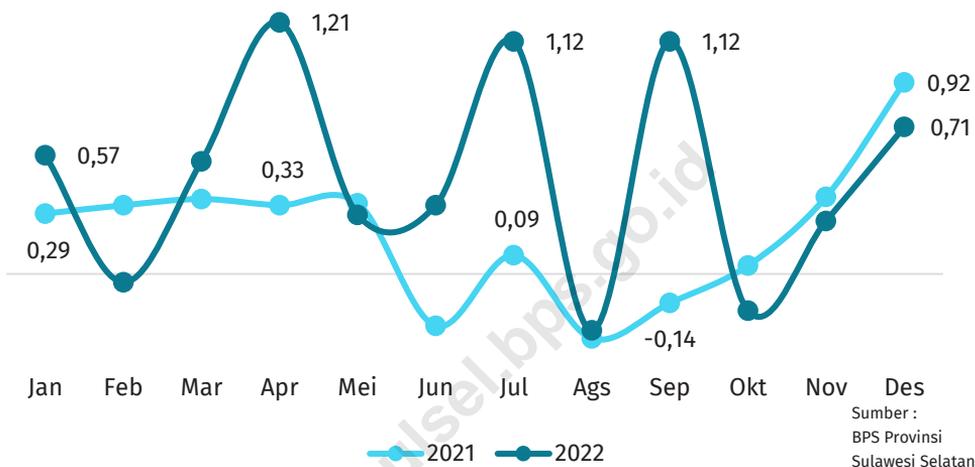
5.2. Faktor yang diduga mempengaruhi Daya Beli

Keynes (1936) dalam Analisis Isu Terkini (BPS, 2017) mengemukakan bahwa pendapatan merupakan faktor utama dalam mempengaruhi konsumsi. Semakin tinggi pendapatan maka semakin tinggi konsumsi. Kondisi daya beli masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Daya beli masyarakat yang berpenghasilan tetap dan tidak mampu, akan menurun apabila harga – harga barang terus naik di pasaran. Oleh sebab itu, inflasi dapat berpengaruh pada daya beli masyarakat.



Gambar 5.2 Laju Inflasi Gabungan 5 Kota Inflasi di Sulawesi Selatan, 2016-2022

Gambar 5.2 menunjukkan tren laju inflasi gabungan 5 kota di Sulawesi Selatan dari tahun 2016 hingga 2022. Laju inflasi tahunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 adalah sebesar 5,77 persen. Hal ini menggambarkan bahwa sepanjang tahun 2022 keadaan harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan sebesar 5,77 persen. Jika dibandingkan dengan laju inflasi tahun 2021 yang sebesar 2,40 persen, kondisi tersebut secara umum menggambarkan bahwa tingkat kestabilan harga tahun 2022 tidak lebih baik dibanding dengan tahun 2021, bahkan menunjukkan peningkatan harga yang cukup signifikan.



Gambar 5.3 Laju Inflasi Bulanan Gabungan 5 Kota Inflasi di Sulawesi Selatan, 2021-2022

Angka inflasi bulanan dari gabungan 5 kota di Sulawesi Selatan selama tahun 2022 menunjukkan adanya fluktuasi. Sepanjang tahun 2022 Sulawesi Selatan mengalami inflasi sebanyak 9 kali dan deflasi sebanyak 3 kali. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan April 2022 sebesar 1,21 persen dan inflasi terendah terjadi pada bulan November 2022 sebesar 0,25 persen. Penyebab utama kenaikan inflasi pada bulan April adalah naiknya harga pada semua kelompok pengeluaran, 3 yang paling tinggi adalah kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,37 persen, Transportasi sebesar 0,65 persen, dan perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan sebesar 0,62 persen. Di sisi lain, deflasi terdalam pada tahun 2022 terjadi pada bulan Agustus 2022 sebesar -0,27 persen. Penyebab utamanya terjadinya deflasi adalah turunnya harga pada dua kelompok pengeluaran yaitu kelompok transportasi sebesar -1,02 persen dan kelompok kesehatan sebesar -0,01 persen.

Berdasarkan hasil gambaran indikator pengukuran daya beli masyarakat (pengeluaran konsumsi rumah tangga) dan faktor yang diduga mempengaruhi daya beli masyarakat (laju inflasi) memberikan gambaran efek yang searah yang artinya bahwa pertumbuhan PKRT selama tahun 2022 mengalami fluktuatif dan inflasi tahunan juga lebih tinggi di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Sementara Inflasi bulanan berfluktuasi dan cenderung meningkat di beberapa

bulan tertentu terutama mendekati periode akhir tahun. Keselasan antara pertumbuhan PKRT dengan inflasi yang meningkat menunjukkan masih adanya permintaan/konsumsi masyarakat di Sulawesi Selatan pada periode tersebut yang mana harga-harga barang sedang tinggi.

<https://sulsel.bps.go.id>

Lampiran

<https://sulsel.bps.go.id>

Lampiran 1

Tren Umur Harapan Hidup (UHH) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2015-2022 (Tahun)

Kode	Prov/Kab/Kota	Umur Harapan Hidup (UHH)							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
7301	Selayar	67,70	67,76	67,82	68,03	68,34	68,46	68,52	68,81
7302	Bulukumba	66,73	66,84	66,96	67,27	67,69	67,92	68,10	68,51
7303	Bantaeng	69,77	69,84	69,90	70,11	70,42	70,54	70,60	70,88
7304	Jeneponto	65,49	65,57	65,65	65,89	66,24	66,39	66,49	66,81
7305	Takalar	66,20	66,29	66,38	66,64	67,01	67,18	67,30	67,64
7306	Gowa	69,88	69,92	69,95	70,11	70,37	70,43	70,45	70,70
7307	Sinjai	66,46	66,54	66,61	66,83	67,17	67,30	67,38	67,68
7308	Maros	68,55	68,58	68,60	68,74	68,98	69,02	69,04	69,28
7309	Pangkajene Kepulauan	65,67	65,77	65,86	66,12	66,49	66,66	66,78	67,12
7310	Barru	68,03	68,16	68,30	68,60	68,91	69,02	69,07	69,35
7311	Bone	66,01	66,12	66,22	66,50	66,88	67,07	67,21	67,57
7312	Soppeng	68,52	68,62	68,72	69,02	69,43	69,65	69,81	70,20
7313	Wajo	66,23	66,38	66,52	66,79	67,17	67,35	67,48	67,82
7314	Sidenreng Rappang	68,57	68,69	68,82	69,15	69,59	69,83	70,01	70,41
7315	Pinrang	68,43	68,55	68,68	68,98	69,39	69,61	69,77	70,15
7316	Enrekang	70,31	70,34	70,38	70,55	70,83	70,91	70,93	71,17
7317	Luwu	69,44	69,52	69,60	69,84	70,19	70,34	70,44	70,75
7318	Tana Toraja	72,41	72,48	72,56	72,80	73,15	73,30	73,40	73,72
7322	Luwu Utara	67,40	67,50	67,61	67,90	68,31	68,51	68,67	69,03
7325	Luwu Timur	69,64	69,71	69,79	70,03	70,38	70,53	70,63	70,94
7326	Toraja Utara	72,80	72,87	72,94	73,09	73,35	73,39	73,41	73,65
7371	Kota Makassar	71,47	71,49	71,51	71,70	72,00	72,09	72,13	72,40
7372	Kota ParePare	70,59	70,64	70,69	70,88	71,18	71,27	71,31	71,57
7373	Kota Palopo	70,20	70,25	70,30	70,49	70,79	70,88	70,92	71,18
7300	Sulawesi Selatan	69,80	69,82	69,84	70,08	70,43	70,57	70,66	70,97

Lampiran 2

Tren Harapan Lama Sekolah (HLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2015-2022 (Tahun)

Kode	Prov/Kab/Kota	Expected Years of Schooling (EYS)							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
7301	Selayar	12,29	12,44	12,45	12,46	12,48	12,65	12,66	12,67
7302	Bulukumba	12,32	12,64	12,65	12,79	12,91	13,17	13,41	13,42
7303	Bantaeng	11,67	11,88	11,99	12,01	12,03	12,04	12,05	12,30
7304	Jeneponto	11,70	11,77	11,93	11,95	11,97	11,98	12,10	12,11
7305	Takalar	11,61	12,00	12,21	12,22	12,25	12,41	12,42	12,48
7306	Gowa	12,74	13,03	13,04	13,29	13,48	13,64	13,65	13,66
7307	Sinjai	12,34	12,83	12,84	12,85	12,87	13,05	13,06	13,25
7308	Maros	12,67	12,96	12,97	12,99	13,02	13,04	13,16	13,30
7309	Pangkajene Kepulauan	12,38	12,39	12,40	12,41	12,51	12,76	12,77	12,78
7310	Barru	13,53	13,54	13,55	13,56	13,57	13,58	13,59	13,61
7311	Bone	12,41	12,42	12,43	12,67	12,80	12,88	12,98	12,99
7312	Soppeng	11,81	12,20	12,33	12,57	12,73	12,90	13,05	13,20
7313	Wajo	13,07	13,08	13,09	13,11	13,13	13,14	13,15	13,30
7314	Sidenreng Rappang	12,88	12,89	12,90	12,91	12,93	12,94	12,95	13,01
7315	Pinrang	13,17	13,18	13,19	13,20	13,22	13,23	13,24	13,25
7316	Enrekang	13,30	13,65	13,66	13,68	13,69	13,70	13,71	13,86
7317	Luwu	12,88	13,27	13,28	13,30	13,32	13,33	13,39	13,40
7318	Tana Toraja	13,23	13,24	13,25	13,50	13,58	13,80	13,86	13,87
7322	Luwu Utara	12,11	12,33	12,38	12,39	12,42	12,43	12,57	12,58
7325	Luwu Timur	12,36	12,78	12,79	12,81	12,82	12,83	12,84	13,00
7326	Toraja Utara	12,95	13,33	13,34	13,35	13,37	13,38	13,39	13,41
7371	Kota Makasar	14,76	14,80	15,18	15,55	15,56	15,57	15,58	15,59
7372	Kota ParePare	14,44	14,45	14,46	14,47	14,49	14,50	14,51	14,52
7373	Kota Palopo	15,02	15,03	15,05	15,06	15,07	15,08	15,09	15,10
7300	Sulawesi Selatan	12,99	13,16	13,28	13,34	13,36	13,45	13,52	13,53

Lampiran 3

Tren Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2015-2022 (Tahun)

Kode	Prov/Kab/Kota	Mean Years of Schooling (MYS)							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
7301	Selayar	7,16	7,17	7,18	7,40	7,63	7,88	8,08	8,09
7302	Bulukumba	6,68	6,86	7,16	7,34	7,43	7,67	7,82	8,01
7303	Bantaeng	6,16	6,17	6,45	6,47	6,48	6,72	6,77	6,81
7304	Jeneponto	5,64	5,65	5,98	6,21	6,48	6,59	6,60	6,75
7305	Takalar	6,57	6,64	6,77	6,91	7,18	7,29	7,49	7,64
7306	Gowa	7,24	7,52	7,74	7,75	7,97	8,19	8,20	8,40
7307	Sinjai	7,05	7,06	7,28	7,29	7,48	7,75	7,78	7,79
7308	Maros	7,19	7,20	7,42	7,43	7,46	7,73	8,01	8,02
7309	Pangkajene Kepulauan	7,32	7,33	7,48	7,49	7,60	7,66	7,92	8,05
7310	Barru	7,60	7,61	7,85	7,86	7,96	8,23	8,24	8,25
7311	Bone	6,55	6,76	6,77	6,97	6,98	7,15	7,23	7,36
7312	Soppeng	7,05	7,06	7,42	7,63	7,74	7,81	7,82	7,96
7313	Wajo	6,37	6,38	6,78	6,79	6,80	6,81	7,05	7,16
7314	Sidenreng Rappang	7,32	7,33	7,52	7,79	7,83	7,84	7,94	8,04
7315	Pinrang	7,47	7,48	7,54	7,84	7,85	7,86	7,87	8,04
7316	Enrekang	8,05	8,06	8,43	8,68	8,89	8,90	8,91	8,93
7317	Luwu	7,74	7,75	7,89	7,97	8,15	8,24	8,35	8,48
7318	Tana Toraja	7,91	7,92	7,93	7,94	8,02	8,26	8,51	8,52
7322	Luwu Utara	7,38	7,39	7,52	7,53	7,78	7,79	7,86	7,87
7325	Luwu Timur	7,87	7,88	8,20	8,45	8,54	8,80	8,81	8,92
7326	Toraja Utara	7,71	7,72	7,73	7,76	7,92	7,96	8,25	8,26
7371	Kota Makassar	10,77	11,07	11,08	11,09	11,20	11,21	11,43	11,55
7372	Kota ParePare	10,01	10,02	10,09	10,29	10,30	10,45	10,65	10,66
7373	Kota Palopo	10,25	10,26	10,33	10,51	10,75	10,76	10,94	11,09
7300	Sulawesi Selatan	7,64	7,75	7,95	8,02	8,26	8,38	8,46	8,63

Lampiran 4

Tren Paritas Daya beli (PPP) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2015-2022 (Ribu Rupiah)

Kode	Prov/Kab/Kota	Pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan (Juta Rupiah/Orang/Tahun)							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
7301	Selayar	7.793	8.123	8.436	8.666	9.028	8.970	9.060	9.446
7302	Bulukumba	9.777	10.040	10.217	10.331	10.480	10.513	10.632	10.941
7303	Bantaeng	10.467	10.596	10.751	11.153	11.592	11.632	11.829	12.133
7304	Jeneponto	8.489	8.559	8.747	8.957	9.078	9.114	9.215	9.425
7305	Takalar	9.423	9.759	9.845	10.134	10.474	10.454	10.543	10.746
7306	Gowa	8.578	8.717	9.009	9.179	9.369	9.394	9.504	9.812
7307	Sinjai	8.433	8.706	8.816	9.098	9.465	9.439	9.505	9.726
7308	Maros	9.468	9.758	10.121	10.558	10.981	10.963	11.032	11.403
7309	Pangkajene Kepulauan	10.517	10.670	10.837	11.197	11.392	11.405	11.519	11.817
7310	Barru	9.811	10.155	10.285	10.622	10.911	10.923	11.017	11.275
7311	Bone	7.930	8.275	8.470	8.686	8.954	8.963	9.030	9.277
7312	Soppeng	8.835	8.965	9.035	9.291	9.444	9.483	9.558	9.756
7313	Wajo	11.047	11.681	11.770	12.057	12.399	12.386	12.505	12.729
7314	Sidenreng Rappang	11.004	11.368	11.523	11.834	12.039	12.073	12.201	12.379
7315	Pinrang	10.791	10.899	11.279	11.508	11.828	11.844	11.956	12.102
7316	Enrekang	9.818	10.188	10.359	10.683	10.800	10.844	10.973	11.183
7317	Luwu	9.160	9.301	9.381	9.705	10.085	10.014	10.116	10.308
7318	Tana Toraja	6.273	6.509	6.801	7.087	7.253	7.217	7.434	7.584
7322	Luwu Utara	10.697	10.786	11.101	11.429	11.583	11.562	11.736	12.105
7325	Luwu Timur	11.926	11.960	12.030	12.346	12.802	12.814	12.886	13.058
7326	Toraja Utara	7.033	7.228	7.457	7.783	8.083	8.097	8.134	8.494
7371	Kota Makassar	15.669	16.013	16.367	16.597	16.989	16.873	17.097	17.406
7372	Kota ParePare	12.817	12.966	13.078	13.303	13.648	13.663	13.786	14.027
7373	Kota Palopo	12.005	12.156	12.319	12.662	12.986	12.995	13.117	13.404
7300	Sulawesi Selatan	9.992	10.281	10.489	10.814	11.118	11.079	11.184	11.430

Lampiran 5

Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, 2015-2022

Kode	Prov/Kab/Kota	IPM							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
7301	Selayar	64,32	64,95	65,39	66,04	66,91	67,38	67,76	68,35
7302	Bulukumba	65,58	66,46	67,08	67,70	68,28	68,99	69,62	70,34
7303	Bantaeng	66,20	66,59	67,27	67,76	68,30	68,73	68,99	69,69
7304	Jeneponto	61,61	61,81	62,67	63,33	64,00	64,26	64,56	65,13
7305	Takalar	64,07	64,96	65,48	66,07	66,94	67,31	67,72	68,31
7306	Gowa	66,87	67,70	68,33	68,87	69,66	70,14	70,29	70,99
7307	Sinjai	64,48	65,36	65,80	66,24	67,05	67,60	67,75	68,33
7308	Maros	67,13	67,76	68,42	68,94	69,50	69,86	70,41	71,00
7309	Pangkajene Kepulauan	66,65	66,86	67,25	67,71	68,29	68,72	69,21	69,79
7310	Barru	68,64	69,07	69,56	70,05	70,60	71,00	71,13	71,53
7311	Bone	63,11	63,86	64,16	65,04	65,67	66,06	66,40	67,01
7312	Soppeng	65,33	65,95	66,67	67,60	68,26	68,67	68,99	69,70
7313	Wajo	66,90	67,52	68,18	68,57	69,05	69,15	69,62	70,26
7314	Sidenreng Rappang	69,00	69,39	69,84	70,60	71,05	71,21	71,54	72,06
7315	Pinrang	69,24	69,42	69,90	70,62	71,12	71,26	71,45	71,97
7316	Enrekang	70,03	70,79	71,44	72,15	72,66	72,76	72,91	73,39
7317	Luwu	68,11	68,71	69,02	69,60	70,39	70,51	70,85	71,36
7318	Tana Toraja	65,75	66,25	66,82	67,66	68,25	68,75	69,49	69,88
7322	Luwu Utara	67,44	67,81	68,35	68,79	69,46	69,57	70,02	70,51
7325	Luwu Timur	70,43	70,95	71,46	72,16	72,80	73,22	73,34	73,92
7326	Toraja Utara	66,76	67,49	67,90	68,49	69,23	69,33	69,75	70,36
7371	Kota Makassar	79,94	80,53	81,13	81,73	82,25	82,25	82,66	83,12
7372	Kota ParePare	76,31	76,48	76,68	77,19	77,62	77,86	78,21	78,54
7373	Kota Palopo	76,27	76,45	76,71	77,30	77,98	78,06	78,38	78,91
7300	Sulawesi Selatan	69,15	69,76	70,34	70,90	71,66	71,93	72,24	72,82

Lampiran 6

Tren Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi di Indonesia, 2015-2022

Provinsi	[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Aceh	69,45	70,00	70,60	71,19	71,90	71,99	72,18	72,80
Sumatera Utara	69,51	70,00	70,57	71,18	71,74	71,77	72,00	72,71
Sumatera Barat	69,98	70,73	71,24	71,73	72,39	72,38	72,65	73,26
Riau	70,84	71,20	71,79	72,44	73,00	72,71	72,94	73,52
Jambi	68,89	69,62	69,99	70,65	71,26	71,29	71,63	72,14
Sumatera Selatan	67,46	68,24	68,86	69,39	70,02	70,01	70,24	70,90
Bengkulu	68,59	69,33	69,95	70,64	71,21	71,40	71,64	72,16
Lampung	66,95	67,65	68,25	69,02	69,57	69,69	69,90	70,45
Kep. Bangka Belitung	69,05	69,55	69,99	70,67	71,30	71,47	71,69	72,24
Kepulauan Riau	73,75	73,99	74,45	74,84	75,48	75,59	75,79	76,46
DKI Jakarta	78,99	79,60	80,06	80,47	80,76	80,77	81,11	81,65
Jawa Barat	69,50	70,05	70,69	71,30	72,03	72,09	72,45	73,12
Jawa Tengah	69,49	69,98	70,52	71,12	71,73	71,87	72,16	72,79
DI Yogyakarta	77,59	78,38	78,89	79,53	79,99	79,97	80,22	80,64
Jawa Timur	68,95	69,74	70,27	70,77	71,50	71,71	72,14	72,75
Banten	70,27	70,96	71,42	71,95	72,44	72,45	72,72	73,32
Bali	73,27	73,65	74,30	74,77	75,38	75,50	75,69	76,44
Nusa Tenggara Barat	65,19	65,81	66,58	67,30	68,14	68,25	68,65	69,46
Nusa Tenggara Timur	62,67	63,13	63,73	64,39	65,23	65,19	65,28	65,90
Kalimantan Barat	65,59	65,88	66,26	66,98	67,65	67,66	67,90	68,63
Kalimantan Tengah	68,53	69,13	69,79	70,42	70,91	71,05	71,25	71,63
Kalimantan Selatan	68,38	69,05	69,65	70,17	70,72	70,91	71,28	71,84
Kalimantan Timur	74,17	74,59	75,12	75,83	76,61	76,24	76,88	77,44
Kalimantan Utara	68,76	69,20	69,84	70,56	71,15	70,63	71,19	71,83
Sulawesi Utara	70,39	71,05	71,66	72,20	72,99	72,93	73,30	73,81
Sulawesi Tengah	66,76	67,47	68,11	68,88	69,50	69,55	69,79	70,28
Sulawesi Selatan	69,15	69,76	70,34	70,90	71,66	71,93	72,24	72,82
Sulawesi Tenggara	68,75	69,31	69,86	70,61	71,20	71,45	71,66	72,23
Gorontalo	65,86	66,29	67,01	67,71	68,49	68,68	69,00	69,81
Sulawesi Barat	62,96	63,60	64,30	65,10	65,73	66,11	66,36	66,92
Maluku	67,05	67,60	68,19	68,87	69,45	69,49	69,71	70,22
Maluku Utara	65,91	66,63	67,20	67,76	68,70	68,49	68,76	69,47
Papua Barat	61,73	62,21	62,99	63,74	64,70	65,09	65,26	65,89
Papua	57,25	58,05	59,09	60,06	60,84	60,44	60,62	61,39
Indonesia	69,55	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94	72,29	72,91

Lampiran 7

Tren Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Paritas Daya Beli (PPP) Menurut Provinsi, 2021-2022

Provinsi	UHH		HLS		RLS		PPP	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Aceh	69,96	70,18	14,36	14,37	9,37	9,44	9.572	9.963
Sumatera Utara	69,23	69,61	13,27	13,31	9,58	9,71	10.499	10.848
Sumatera Barat	69,59	69,90	14,09	14,10	9,07	9,18	10.790	11.130
Riau	71,67	71,95	13,28	13,29	9,19	9,22	10.736	11.158
Jambi	71,22	71,50	13,04	13,05	8,60	8,68	10.588	10.871
Sumatera Selatan	69,98	70,32	12,54	12,55	8,30	8,37	10.662	11.109
Bengkulu	69,42	69,69	13,67	13,68	8,87	8,91	10.487	10.840
Lampung	70,73	70,99	12,73	12,74	8,08	8,18	10.038	10.336
Kep. Bangka Belitung	70,73	70,98	12,17	12,18	8,08	8,11	12.819	13.358
Kepulauan Riau	70,12	70,50	12,98	12,99	10,18	10,37	14.122	14.469
DKI Jakarta	73,01	73,32	13,07	13,08	11,17	11,31	18.520	18.927
Jawa Barat	73,23	73,52	12,61	12,62	8,61	8,78	10.934	11.277
Jawa Tengah	74,47	74,57	12,77	12,81	7,75	7,93	11.034	11.377
DI Yogyakarta	75,04	75,08	15,64	15,65	9,64	9,75	14.111	14.482
Jawa Timur	71,38	71,74	13,36	13,37	7,88	8,03	11.707	11.992
Banten	70,02	70,39	13,02	13,05	8,93	9,13	12.033	12.216
Bali	72,24	72,60	13,40	13,48	9,06	9,39	13.820	13.942
Nusa Tenggara Barat	66,69	67,07	13,90	13,96	7,38	7,61	10.377	10.681
Nusa Tenggara Timur	67,15	67,47	13,20	13,21	7,69	7,70	7.554	7.877
Kalimantan Barat	70,76	71,02	12,65	12,66	7,45	7,59	8.974	9.355
Kalimantan Tengah	69,79	70,04	12,74	12,75	8,64	8,65	11.182	11.458
Kalimantan Selatan	68,83	69,13	12,81	12,82	8,34	8,46	12.143	12.469
Kalimantan Timur	74,61	74,62	13,81	13,84	9,84	9,92	12.116	12.641
Kalimantan Utara	72,65	72,67	12,94	13,06	9,11	9,27	9.075	9.350
Sulawesi Utara	71,76	72,08	12,94	12,95	9,62	9,68	10.882	11.179
Sulawesi Tengah	68,83	68,93	13,23	13,32	8,89	8,89	9.378	9.696
Sulawesi Selatan	70,66	70,97	13,52	13,53	8,46	8,63	11.184	11.430
Sulawesi Tenggara	71,27	71,37	13,68	13,69	9,13	9,25	9.381	9.708
Gorontalo	68,19	68,51	13,11	13,12	7,90	8,02	10.157	10.687
Sulawesi Barat	65,25	65,63	12,86	12,87	7,96	8,08	9.153	9.358
Maluku	66,09	66,45	13,97	14,00	10,03	10,19	8.770	8.876
Maluku Utara	68,45	68,79	13,68	13,73	9,09	9,24	8.140	8.398
Papua Barat	66,14	66,46	13,13	13,21	7,69	7,84	7.929	8.101
Papua	65,93	66,23	11,11	11,14	6,76	7,02	6.955	7.146
Indonesia	71,57	71,85	13,08	13,10	8,54	8,69	11.156	11.479

ST 2023
SENSUS PERTANIAN

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jl. H. Bau No. 6, Makassar, 90125
Telp.: (0411) 854838, Fax: (0411) 85125
Homepage: <http://sulsel.bps.go.id>
E-mail: bps7300@bps.go.id